



# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2019

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang (Setmenko) Kemaritiman Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2019. Laporan Kinerja Triwulan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Setmenko Kemaritiman yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA. 2019. Dalam laporan kinerja Triwulan II TA. 2019 disusun hasil capaian sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Setmenko Kemaritiman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Setmenko Kemaritiman Tahun 2015-2019.

Dalam Laporan Kinerja ini disampaikan hasil dan penjelasan capaian kinerja/kegiatan pada Setmenko Kemaritiman yang meliputi Biro Perencanaan, Biro Umum dan Biro Informasi dan Hukum sampai akhir triwulan II Tahun Anggaran 2019.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban; kinerja yang telah ditetapkan; sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Setmenko Kemaritiman; serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2019

**Sekretaris Kementerian Koordinator**

**Agus Purwoto**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Setmenko Kemaritiman diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Setmenko Kemaritiman Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Setmenko Bidang Kemaritiman yaitu membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Kemaritiman.

Dalam mencapai tujuannya, Kemenko Kemaritiman telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman diukur dengan Indikator Kinerja (IK) yang dirinci sesuai target setiap tahunnya. Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja hasil (*outcome*) yang dihasilkan pada unit kerja eselon I atau melalui kinerja keluaran (*output*) dari unit kerja eselon II dibawahnya yaitu berupa indikator kinerja kegiatan.

Dalam Renstra Setmenko Kemaritiman tahun 2015-2019 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK) sesuai dengan hasil revidi dan rekomendasi dari Kementerian PAN-RB ketika mengevaluasi pelaksanaan SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dilakukan perubahan/penyesuaian SP dan IK dalam Perjanjian Kinerja, pada Perjanjian Kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2019 terdiri dari 3 (tiga) perspektif yang terbagi dalam 8 SP dan 14 IKP.

Capaian kinerja Setmenko Kemaritiman triwulan II TA. 2019 adalah 102,41% dengan rincian sebagai berikut:

1. *Customer Perspective* hanya terdiri dari 1 (satu) SP yaitu terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Kemenko Kemaritiman dengan capaian 98,93%. SP ini terdiri dari 4 IKP dengan rincian capaian sebagai berikut:
  - a. Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (tercapai di triwulan I)
  - b. Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (97,85%)
  - c. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (tercapai di triwulan I)
  - d. Tingkat opini BPK (100%)
  - e. Indeks Maturitas SPIP Kemenko Kemaritiman (belum ditargetkan)

2. *Internal Business Process* tercapai 105,88%, terdiri dari 7 (tujuh) SP dengan rincian capaian sebagai berikut:
    - a. SP.2 Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (belum ditargetkan)
    - b. SP.3 Tersedianya layanan Kehumasan (117,89%)
    - c. SP.4 Tersedianya layanan Persidangan yang Efektif (104,38%)
    - d. SP.5 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi (93,64%)
    - e. SP.6 Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal (100,95%)
    - f. SP.7 Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang Akurat (102,2%)
    - g. SP.8 Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (100%)
  3. *Learning and Growth* tercapai 100%, terdiri dari 2 (dua) SP dengan masing-masing SP terdiri dari 1 IKP., dengan rincian capaian sebagai berikut:
    - a. SP.9 Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator
    - b. SP.10 Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator.
- Perspektif ini tidak ditargetkan pada triwulan II.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	1
1.2. Organisasi dan Personalia.....	3
1.3. Sistematika Penyajian.....	4
II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Sasaran Program.....	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja.....	7
2.3. Program dan Kegiatan.....	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja.....	12
3.1.1. Sasaran Program (SP) 1.....	17
3.1.2. Sasaran Program (SP) 2.....	27
3.1.3. Sasaran Program (SP) 3.....	30
3.1.4. Sasaran Program (SP) 4.....	32
3.1.5. Sasaran Program (SP) 5.....	33
3.1.6. Sasaran Program (SP) 6.....	38
3.1.7. Sasaran Program (SP) 7.....	41
3.1.8. Sasaran Program (SP) 8.....	49
3.1.9. Sasaran Program (SP) 9.....	49
3.1.10. Sasaran Program (SP) 10.....	51
3.2. Capaian Realisasi Keuangan.....	52
3.3. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai.....	56
IV. PENUTUP.....	58
LAMPIRAN.....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Program Setmenko Tahun 2019.....	6
Tabel 2 Target Kinerja Setmenko Kemaritiman.....	8
Tabel 3 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas .....	9
Tabel 4 Bobot Bukti Hasil Kinerja.....	9
Tabel 5. Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman Triwulan II TA. 2019.....	12
Tabel 6 Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman Triwulan I TA. 2019.....	14
Tabel 7 Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman Semester I TA. 2019 .....	15
Tabel 8 Nilai Capaian Kinerja per Perspektif per Triwulan .....	17
Tabel 9 Sasaran Program (SP) 1.....	17
Tabel 10 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Kemaritiman.....	18
Tabel 11 Nilai AKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.....	19
Tabel 12 Capaian Nilai Indeks SPBE Kemenko Kemaritiman Tahun 2018.....	23
Tabel 13 Nilai Rerata Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2019 .....	23
Tabel 14 Level Maturitas SPIP kemenko Kemaritiman.....	26
Tabel 15 Kriteria dan Hasil Survei Kepuasan TIK .....	28
Tabel 16 Target dan Capaian SP.4 Triwulan II TA. 2019.....	30
Tabel 17 Rekap Jumlah Opini Pemberitaan Bidang Kemaritiman.....	31
Tabel 18 Target dan Capaian SP.5 Triwulan I TA. 2019.....	34
Tabel 19 Peraturan Perundang-undangan TW II Tahun 2019.....	35
Tabel 20 Sasaran Program (SP) 5.....	38
Tabel 21 Sarana dan Prasarana Kemenko Kemaritiman Triwulan II 2019.....	40
Tabel 22 Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Triwulan 1 2019 .....	41
Tabel 23 Sasaran Program (SP) 6.....	42
Tabel 24 Rincian Capaian Pelaksanaan SAKIP Triwulan II TA. 2019.....	43
Tabel 25 Rincian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA. 2019 .....	44
Tabel 26 Kode dan Nama Keluaran (Output) Kemenko Kemaritiman Tahun 2019.....	47
Tabel 27 Perhitungan Konsistensi Anggaran Triwulan II TA. 2019 .....	47
Tabel 28 Hasil penilaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Setmenko Tahun 2018.....	50
Tabel 29 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan II TA. 2019.....	52
Tabel 30 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Semester I TA. 2019 per Unit Kerja...	53
Tabel 31 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan II TA. 2019 per Keluaran ....	54
Tabel 32 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Semester I TA. 2019 per Keluaran ....	54
Tabel 33 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan II per bulan.....	55
Tabel 34 Realisasi Keuangan per bulana Setmenko Kemaritiman Semester I 2019 .....	56
Tabel 35 Jumlah Kondisi Pegawai Setmenko Kemaritiman.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Unit Setmenko Kemaritiman.....	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator.....	4
Gambar 3 Peta Strategis Setmenko Kemaritiman TA. 2019.....	7
Gambar 4 Bobot Aspek Penilaian dan Predikat Index SPBE.....	22
Gambar 5 Grafik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA. 2019.....	45
Gambar 6 Realisasi Keuangan per Program di Setmenko Triwulan II TA. 2019.....	52
Gambar 7 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Semester I TA. 2019.....	53
Gambar 8 Grafik Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan II 2019.....	55
Gambar 9 Grafik Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Semester I 2019.....	56

## DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN

BIH	: Biro Informasi dan Hukum
KP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Kemenko Kemaritiman	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Menko	: Menteri Koordinator
RB	: Reformasi Birokrasi
Roren	: Biro Perencanaan
Roum	: Biro Umum
Renstra	: Rencana Strategis
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja
Setmenko Kemaritiman	: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Sesmenko Kemaritiman	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SP	: Sasaran Program
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka Sekretariat Kementerian Koordinator (Setmenko) Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Setmenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Setmenko Bidang Kemaritiman selama triwulan II TA. 2019 telah melakukan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Setmenko Kemaritiman sehingga target kinerja dapat tercapai.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada TW I tahun 2019, maka disusunlah Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2019. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko Kemaritiman sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Setmenko Kemaritiman dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan protokol, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

### 1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Setmenko adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Setmenko Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Sekretariat Kementerian Koordinator;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Setmenko;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2016-2019 telah selesai disusun dan ditetapkan dengan SK Sesmenko Nomor: SKEP.11/SESMENKO/MARITIM/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016. Berdasarkan Renstra tersebut dapat dijabarkan visi, misi dan tujuan Setmenko.

**Visi** Pelayanan Dan Koordinasi Yang Berkualitas, Efektif dan Terintegrasi dalam Mendukung Perwujudan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

**Misi**

- ✓ Penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Kementerian
- ✓ Pembinaan dukungan sumberdaya Kementerian
- ✓ Pembinaan dan koordinasi akuntabilitas kinerja Kementerian

**Tujuan:**

1. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang berkualitas
2. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

## 1.2. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Setmenko Kemaritiman terdiri dari:

**Gambar 1 Tugas dan Fungsi Unit Setmenko Kemaritiman**

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar negeri, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kementerian

**Biro  
Perencanaan**

**Biro Informasi  
dan Hukum**

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan hukum, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan dan bantuan hukum, serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi, serta penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem informasi, dan komunikasi

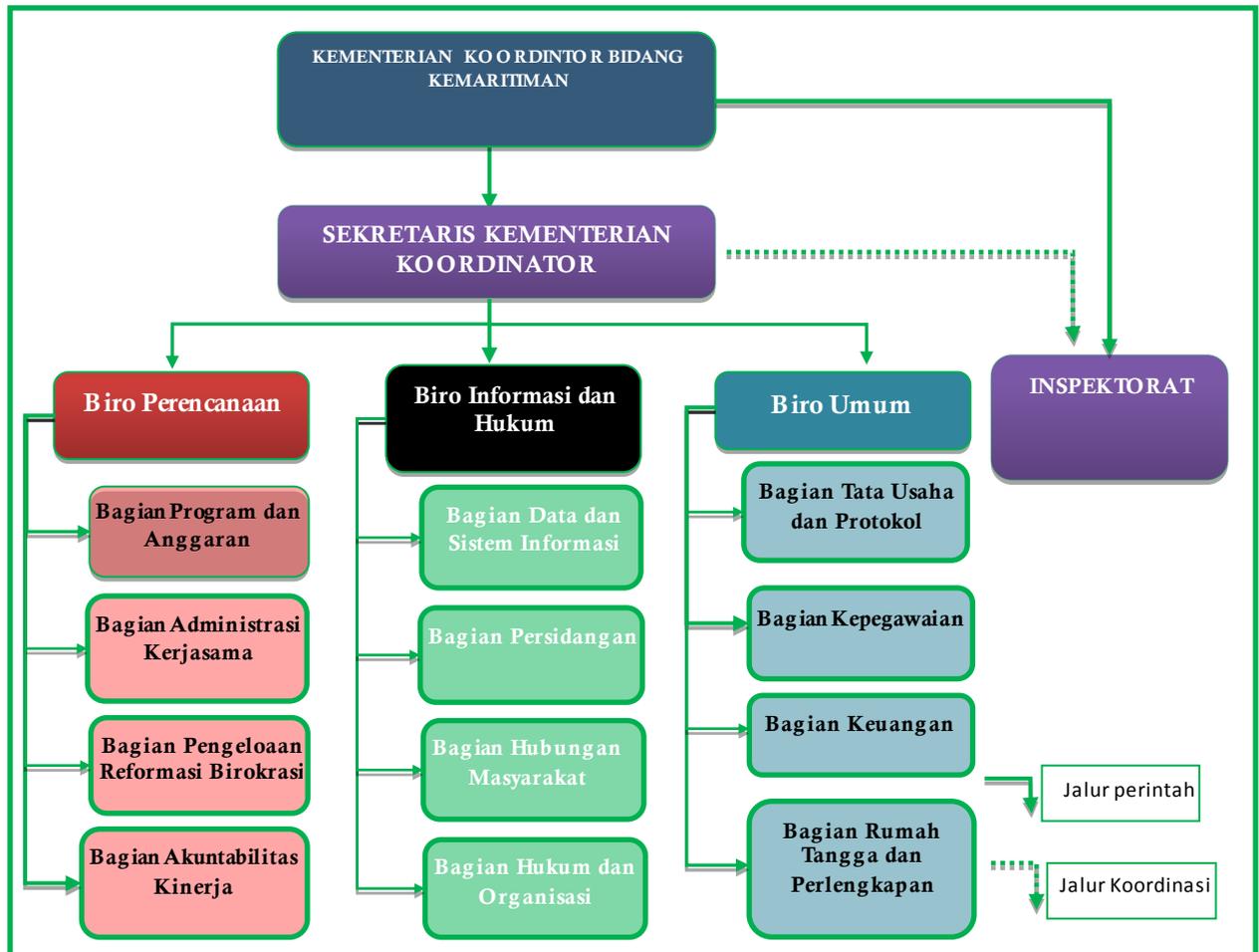
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta laporan kepegawaian; serta mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata laksana keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian ganti rugi, akuntansi keuangan dan barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara

**Biro Umum**

**Inspektorat**

Bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator, dipimpin oleh inspektur, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

**Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator**



Dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sesuai dengan Permenko No. 1 tahun 2015, Inspektorat di bawah perintah langsung Menteri Koordinator namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Kinerja Sekretaris Kementerian ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/ menjadi tanggungjawab Inspektorat.

### 1.3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Setmenko Kemaritiman sampai akhir Triwulan III. Kemudian membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap capaian kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Setmenko Kemaritiman pada triwulan I tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola kinerja program/kegiatan.
2. **Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**, menjelaskan rencana strategis serta penetapan kinerja Triwulan I tahun 2019.
3. **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Kinerja Setmenko Kemaritiman pada Triwulan II tahun 2019, kendala dan rekomendasi.
4. **Bab IV PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Setmenko Kemaritiman pada Triwulan II tahun 2019 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Setmenko Kemaritiman diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko Kemaritiman sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing.

Target kinerja tahun 2019 dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja triwulanan Setmenko Kemaritiman.

### 2.1. Sasaran Program

Instansi pemerintah harus memiliki sasaran kerja yang harus dicapai secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan.

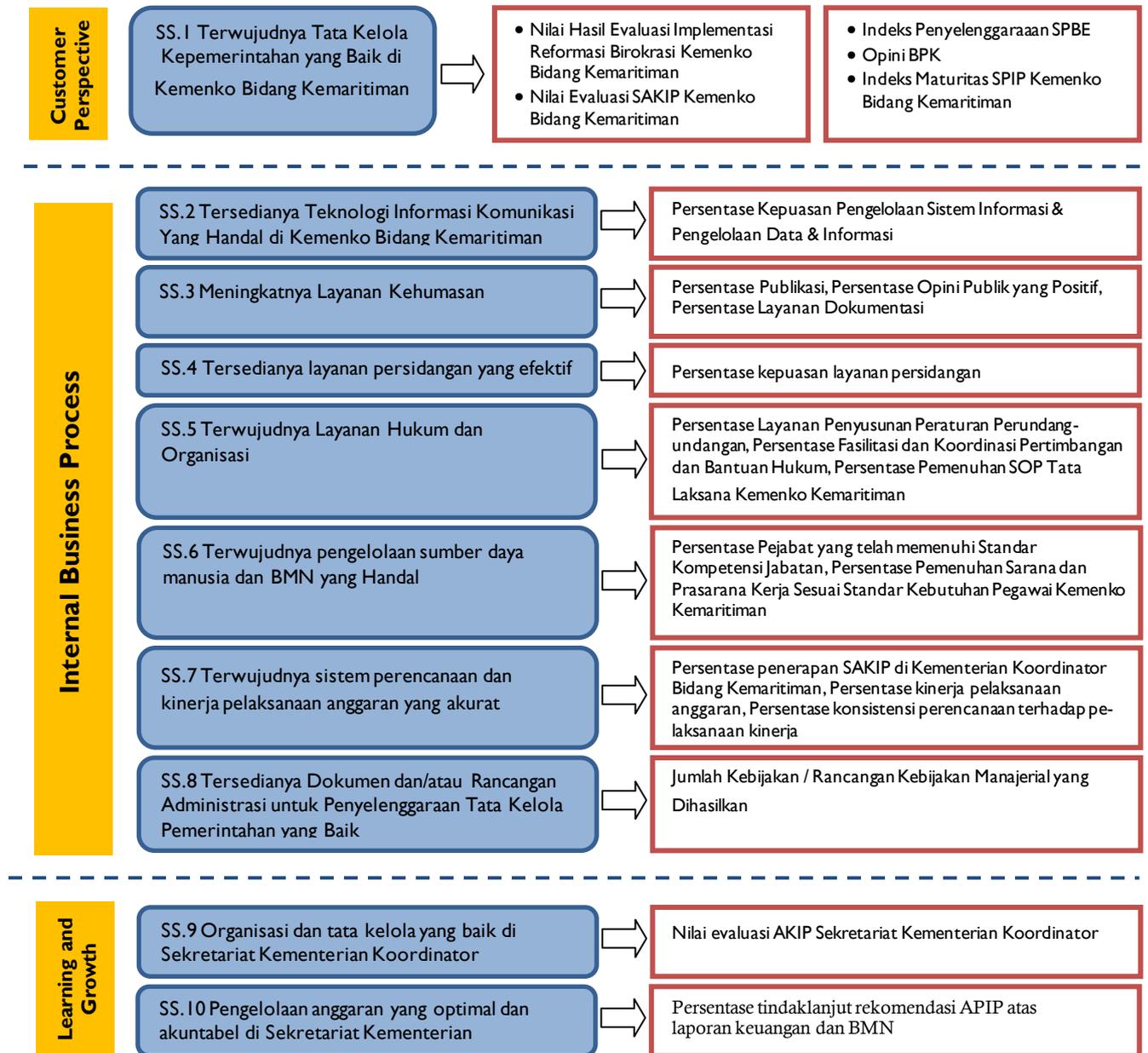
Setmenko Kemaritiman memiliki sasaran program dalam kurun waktu tahun anggaran 2019. Pencapaian sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan secara berkala dan memiliki periode masing-masing per triwulan. Sasaran Program tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Sasaran Program Setmenko Tahun 2019**

<b>SASARAN PROGRAM</b>	
<b><i>Customer Perspective</i></b>	
SP.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
<b><i>Internal Business Process Perspective</i></b>	
SP.2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SP.3	Meningkatnya Layanan Kehumasan
SP.4	Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif
SP.5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi
SP.6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal
SP.7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat
SP.8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
<b><i>Learning &amp; Growth Perspective</i></b>	
SP.9	Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kemenko
SP.10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator

Berdasarkan sasaran program seperti yang telah disusun di atas maka peta strategis Setmenko Kemaritiman disusun sebagai berikut

**Gambar 3 Peta Strategis Setmenko Kemaritiman TA. 2019**



## 2.2. Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ditetapkan target kinerja tahun 2019. Target kinerja ini terdiri dari sasaran program serta indikator kinerja tahun 2019 dan triwulanan 2019. Tidak semua sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian target kinerja (sasaran program) Setmenko Kemaritiman Triwulanan TA. 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Target Kinerja Setmenko Kemaritiman**

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target 2019
<i>Customer Perspective</i>				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70
		2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2
		4	Tingkat opini BPK	WTP
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	3
<i>Internal Business Process Perspective</i>				
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	70
3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	70
4	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	10	Persentase kepuasan layanan persidangan	80
5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	80
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80
6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal	14	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	80
7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran	16	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang	100

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target 2019
	yang akurat		Kemaritiman	
		17	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	90
		18	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	80
8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan	15
<i>Learning and Growth</i>				
9	Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator	20	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator	70
10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator	21	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada.

Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung capaian IKU:

a. Penghitungan capaian IKU dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:

- Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

**Tabel 3 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas**

Jenis IKU	Exact	Proxy	Activity
<b>High</b>	13.33	8.33	5.00
<b>Moderate</b>	15.00	10.00	6.67
<b>Low</b>	18.33	13.33	10.00

- Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

**Tabel 4 Bobot Bukti Hasil Kinerja**

Kategori Penilaian	Bobot
<b>Sesuai</b>	1
<b>Belum Relevan</b>	0.5
<b>Tidak Sesuai</b>	0

- b. Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

- c. Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan menjumlahkan eviden dengan capaian IKU kemudian total penjumlahan dibagi 2

$$\text{Capaian Final IKU} = \frac{\text{Data Dukung} + \text{Capaian IKU}}{2}$$

2. Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagi terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya per SS}}$$

3. Perspektif didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per perspektif

$$\text{Perspektif} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot Sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per Perspektif}}$$

4. Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang dibagi terhadap total bobot perspektif

$$\text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspektif} \times \text{Bobot perspective}}{\text{Total bobot perspective}}$$

## 2.3. Program dan Kegiatan

Setmenko Kemaritiman dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Program yang dilaksanakan oleh Setmenko Kemaritiman adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan umum perkantoran serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
2. Penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
3. Pengelolaan informasi, persidangan, kehumasan, administrasi dan hukum organisasi
4. Pengawasan akuntabilitas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Rekomendasi penguatan dan penataan regulasi dan kelembagaan Kemaritiman

Sasaran yang harus dicapai dalam kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kesekretariatan melalui peningkatan penerapan standar pelayanan kesekretariatan
2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui:
  - a. Pemenuhan SDM yang memenuhi standar kompetensi
  - b. Peningkatan keandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku
  - c. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan untuk seluruh pegawai
  - d. Penerapan pengelolaan sumber daya berbasis IT
  - e. Peningkatan jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional
3. Meningkatnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui:
  - a. Peningkatan penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
  - b. Peningkatan penerapan RB di 8 (delapan) area perubahan
  - c. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran yang memenuhi standar kementerian keuangan

Sehubungan dengan pencapaian sasaran-sasaran di atas, penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diarahkan untuk:

1. Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama yang cermat, akurat dan akuntabel serta pengelolaan reformasi birokrasi yang terkoordinasi dengan baik;
2. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi, urusan persidangan, urusan hukum dan kehumasan yang optimal;
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kesekretariatan dan kerumahtanggaan dengan baik; dan
4. Pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan yang efektif.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana /target kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Hasil penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara matematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

#### 3.1. Capaian Kinerja

Jumlah sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) Setmenko Kemaritiman pada TA. 2019, lebih banyak dibanding tahun 2018. Jika di TA. 2018 hanya ada 8 SP dan 14 IKP, maka pada tahun 2019 terdapat 10 SP dan 21 IKP. Pada Triwulan II ditargetkan sejumlah 7 SP dan 13 IKP, dengan realisasi capaian total sebesar 102,41% dari target, Rinciaan capaian tersebut sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5. Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman Triwulan II TA. 2019**

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
<i>Customer Perspective</i>						<b>98,93</b>
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemenko Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Kemaritiman	-	-	-
		2	Nilai evaluasi SAKIP Kemenko Kemaritiman	70	66,95	97,85
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-
		4	Tingkat opini BPK	WTP	WTP	100
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Kemaritiman	-	-	-
<i>Internal Business Process Perspective</i>						<b>105,88</b>
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kemenko	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan	-	-	-

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
	Kemaritiman		Informasi			
3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70	160	120
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70	91	115
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	70	233	120
4	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	10	Persentase kepuasan layanan persidangan	80	87	104,38
5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	80	71,43	94,64
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80	100	112,50
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kemenko Kemaritiman	80	67	91,88
6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal	14	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	-	-	-
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Kemaritiman	68	69,29	100,95
7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	16	Persentase penerapan SAKIP di Kemenko Kemaritiman	-	-	-
		17	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	91,55	100,86
		18	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	90	96,38	103,54
8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihilangkan	2	2	100
<b>Learning and Growth</b>						<b>-</b>
9	Organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko	20	Nilai evaluasi AKIP Setmenko	-	-	-
10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Setmenko	21	Persentase tindak lanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	-	-	-
<b>Capaian Kinerja Setmenko Triwulan II</b>						<b>102,41</b>

*Keterangan: Capaian sudah dihitung berdasarkan bobot sesuai IKU, SS dan Perspektif*

Nilai capaian triwulan II ini jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I TA. 2018 (tabel 6), maka lebih tinggi 22,27%. Jika yang dihitung adalah jumlah capaian SP dan IKP, maka capaian pada triwulan II unggul 1 (satu) IKP. Target/capaian SP dan IKP dari 2 triwulan tersebut cukup beragam. Dari sekian IKP yang dicapai, terdapat 8 IKP yang sama, yaitu IKP.2, IKP.6, IKP.7, IKP.8, IKP.10, IKP.11, IKP.12, dan IKP.17.

**Tabel 6 Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman Triwulan I TA. 2019**

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
<b>Customer Perspective</b>						
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemenko Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Kemaritiman	70	65,95	97,11
		2	Nilai evaluasi SAKIP Kemenko Kemaritiman	70	-	-
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1,80	95
		4	Tingkat opini BPK	WTP	-	-
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Kemaritiman	3	-	-
<b>Internal Business Process Perspective</b>						
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kemenko Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	70	-	-
3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70	70	75
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70	70	75
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	70	70	75
4	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	10	Persentase kepuasan layanan persidangan	80	-	-
5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	80	53,85	83,66
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80	100	112,50
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kemenko Kemaritiman	80	66,67	66,67
6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal	14	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50	-	-

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Kemaritiman	80	60	60,19
7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	16	Persentase penerapan SAKIP di Kemenko Kemaritiman	100	-	-
		17	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	89,57	99,76
		18	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	80	-	-
8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan	15	-	-
<b>Learning and Growth</b>						
9	Organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko	20	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kemenko	70	-	-
10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Setmenko	21	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100	100	100
<b>Capaian Kinerja Setmenko Triwulan I</b>						<b>92,97</b>

Secara total capaian selama semester I TA. 2019, terdapat 8 SP dan 15 IKP yang sudah ada realisasinya dengan capaian sebesar 100% dari target.

**Tabel 7 Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman Semester I TA. 2019**

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
<b>Customer Perspective</b>						<b>97,49</b>
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemenko Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70	65,95	97,11
		2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70	66,99	97,85
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1,80	95
		4	Tingkat opini BPK	WTP	WTP	100
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	-	-	-

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
<b><i>Internal Business Process Perspective</i></b>						<b>100,99</b>
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kemenko Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	-	-	-
3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70	115	107,14
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70	80,50	95
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	70	151,50	120
4	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	10	Persentase kepuasan layanan persidangan	80	87	104,38
5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	80	62,64	89,15
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80	100	112,50
			Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80	66,84	79,27
6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal	14	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	-	-	-
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	68	69,29	100,95
7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	16	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-	-	-
		17	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	91,55	100,86
		18	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	90	96,38	103,54
8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan	2	2	100
<b><i>Learning and Growth</i></b>						<b>100</b>
9	Organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko	20	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator	-	-	-
10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Setmenko	21	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100	100	100

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Capaian Kinerja Setmenko Semester I						99,49

Capaian per semester, sebagaimana pada tabel di atas, pada semester I ini sudah hampir sesuai dengan target.

Apabila dilihat capaian berdasarkan perspektif, maka capaian pada Triwulan II TA. 2019 ini cenderung meningkat, kecuali di perspektif *Learning and Growth* yang tidak ditargetkan.

**Tabel 8 Nilai Capaian Kinerja per Perspektif per Triwulan**

Perspektif	Bobot (%)	Triwulan I	Triwulan II	Semester I
		Nilai Capaian Kinerja	Nilai Capaian Kinerja	Nilai Capaian Kinerja
<i>Customer</i>	30	64,04	98,93	97,49
<i>Internal Business Process</i>	45	82,84	105,88	100,99
<i>Learning and Growth</i>	25	100	-	100

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Program dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran Program (SP) 1

#### **Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Sasaran Program 1 ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 9 Sasaran Program (SP) 1**

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	5,71	70	65,95	97,11
2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-	70	-	-
3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5,71	2	-	-
4	Tingkat opini BPK	5,71	WTP	WTP	100
5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	5,71	3	-	-
<b>Nilai Capaian SP.1</b>					<b>100</b>

Tujuan dari sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan

pembangunan di Kemenko Bidang Kemaritiman. Seperti ditampilkan dalam tabel di atas, SP.1 ini memiliki 5 (lima) IKP. Dalam perjanjian kinerja, SP.1 ini memiliki bobot 22,86% (48,03% pada triwulan I) dari total sasaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target pada tahun lalu, maka pada tahun 2019 ini terdapat penambahan 1 (satu) IKP, yaitu Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman.

Capaian dan rincian penjelasan dari capaian SP.1 ini adalah sebagai berikut:

### **IKP.1 Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Nilai hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah penilaian hasil implementasi pengelolaan RB pada 8 (delapan) agenda perubahan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nilai penerapan (implementasi) pelaksanaan reformasi birokrasi yang digunakan dalam mengukur capaian IKP.1 ini adalah nilai hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB pada tahun sebelumnya. Nilai RB ini keluar/disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada triwulan I tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB, nilai IKP.1 ini, sesuai dengan surat hasil evaluasi dari KemenPANRB No. B/228/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 maka nilai hasil evaluasi pelaksanaan RB di Kemenko Kemaritiman tahun 2018 adalah 65,95 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 10 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Kemaritiman**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>				
1	Manajemen perubahan	5	3,03	3,18	3,22
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5	2,09	2,71	2,81
3	Penataan dan penguatan organisasi	6	3,68	3,84	3,87
4	Penataan tata laksana	5	1,91	2,41	2,43
5	Penataan sistem manajemen SDM	15	9,78	11,16	11,45
6	Penguatan akuntabilitas	6	3,92	4,35	4,38
7	Penguatan pengawasan	12	5,11	5,11	5,19
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6	2,61	2,46	2,49
	<b>Sub total komponen pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>32,12</b>	<b>35,22</b>	<b>35,84</b>
<b>B</b>	<b>Hasil</b>				
1	Nilai akuntabilitas kinerja	14	8,13	11,21	13,45
2	Survei internal integritas organisasi	6	3,98		

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
3	Survey eksternal persepsi korupsi	7	5,95	8,84	8,86
4	Opini BPK	3	2,00		
5	Survey eksternal pelayanan publik	10	8,17	7,55	7,80
	<b>Sub komponen hasil (B)</b>	<b>40</b>	<b>28,22</b>	<b>27,60</b>	<b>30,11</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>100</b>	<b>60,34</b>	<b>62,82</b>	<b>65,95</b>

Capaian IKP.1 ini adalah 97,11% dari target yang ditetapkan.

## IKP.2 Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Tujuan evaluasi ini juga untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Nilai evaluasi ini juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi Kemenko Kemaritiman dalam penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya. Target Indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah 70.

Indikator kinerja ini pada awalnya ditargetkan pencapaiannya pada Triwulan II maupun pada triwulan I tahun 2019. Namun Kementerian PANRB selaku instansi yang memberikan penilaian pelaksanaan SAKIP, baru memberikan hasil pelaksanaan SAKIP Kemenko Kemaritiman pada triwulan II. .

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Kemenko Kemaritiman adalah 66,99. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 11 Nilai AKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

No	Komponen	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
1	Perencanaan kinerja	30	19,84	20,73	20,94
2	Pengukuran kinerja	25	13,90	14,81	15,95
3	Pelaporan kinerja	15	9,68	10,69	10,85
4	Evaluasi internal	10	3,56	4,92	6,40
5	Capaian kinerja	20	11,06	12,39	12,85
	<b>Nilai hasil evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>58,04</b>	<b>63,54</b>	<b>66,99</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Maritim memperoleh nilai 66,99 atau predikat B. Penilaian tersebut

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kemenko Kemaritiman menunjukkan hasil yang cukup baik namun sangat perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Uraian singkat hasil evaluasi SAKIP di Kemenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manajemen kinerja di Kemenko Kemaritiman telah terlihat dengan menerapkan SAKIP dengan baik. Rekomendasi dari hasil SAKIP tahun sebelumnya, sebagian telah dilakukan perbaikan atau ditindaklanjuti dengan baik, sehingga menggambarkan beberapa kemajuan dalam perbaikan manajemen kinerja.
2. Perbaikan manajemen kinerja secara online dapat dipantau, diukur, dan direviu melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja (*sik-maritim*). Melalui aplikasi tersebut, pimpinan dapat memonitor secara langsung capaian kinerja setiap triwulan.
3. Dokumen akuntabilitas kinerja seperti Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja sampai dengan level eselon II secara formal telah disusun dan disampaikan dengan baik kepada Kementerian PANRB melalui situs [Http://esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) dan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja yang optimal dan nyata.
4. Kinerja secara berjenjang pada setiap level satuan *kerjalcascading* yang sudah disusun, belum sepenuhnya menggambarkan keselarasan kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja di bawahnya.
5. Evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap penerapan SAKIP unit kerja mulai memberikan hasil dalam mendorong perbaikan AKIP pada masing-masing unit kerja. Namun, ruang lingkup dan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.
6. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini juga menunjukkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kemenko Kemaritiman sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas serta agar penerapan budaya kinerja lebih efektif, maka direkomendasikan untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan analisis hubungan kinerja dan menentukan ukuran kinerja antara Menteri ke unit kerja di bawahnya sampai dengan unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu sehingga terbentuk pohon kinerja Kemenko Kemaritiman.
2. Aplikasi e-Kinerja (*sik-maritim.id*) yang telah diimplementasikan akan lebih baik jika dapat dikembangkan sehingga dapat menampilkan gambaran

hubungan/ keterkaitan antara kinerja *-(outcome)* organisasi dari level Menteri ke Eselon I ke Eselon II ke Eselon III kemudian Eselon IV sampai kepada Output di level individu. Aplikasi *sik-maritim.id* juga lebih baik jika dapat menyampaikan informasi atas capaian kinerja organisasi di setiap level organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja, capaian program/ kegiatan *(output)* yang ada pada Renja, serta serapan anggaran yang mendukung capaian kinerja tersebut.

3. Melakukan pengembangan aplikasi teknologi informasi keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi kinerja *(e-Performance)* yang dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja sebagai media dalam melakukan reuview capaian kinerja secara berkala dan pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*.
4. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SOM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut, sehingga dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

Dalam meningkatkan nilai capaian SAKIP beberapa langkah telah terus diusahakan/ dilaksanakan, antara lain yaitu:

1. Terus mendorong penerapan manajemen kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM Aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan sehingga kinerja yang akan diwujudkan akan menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai. Hal ini penting untuk mewujudkan *performance based organization* agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja sehingga pada saat pelaporan dan evaluasi kinerja telah tersedia data dan informasi kinerja secara terdokumentasi dengan baik;
3. Memperkuat komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
4. Melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja agar menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reuview terhadap kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan sasaran strategis, dan memastikan bahwa hasil reuview ini digunakan untuk mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi;

- Meningkatkan kualitas dan kapabilitas APiP untuk melakukan evaluasi implementasi sistem AKIP kepada unit kerja sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan.

### **IKP.3 Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5 Tahun 2018. Permen ini mengatur tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk kemudian disingkat SPBE).

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sementara tujuan SPBE itu sendiri adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah.

Evaluasi SPBE didasarkan pada Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

**Gambar 4 Bobot Aspek Penilaian dan Predikat Index SPBE**

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		17%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE		7%			
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE		10%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		28%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 3 - Kelembagaan		8%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan		8%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		12%	5	< 1,8	Kurang
Domain 3 - Layanan SPBE		55%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		33%			
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik		22%			

IKP ini ditargetkan dan telah tercapai pada triwulan I dengan nilai 1,8 atau 90% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 12 Capaian Nilai Indeks SPBE Kemenko Kemaritiman Tahun 2018**

INDEKS	NILAI	INDEKS	NILAI
<b>SPBE</b>	<b>1,8</b>	<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>1,71</b>
Domain Kebijakan SPBE	2,00	Kelembagaan	0,57
Kebijakan Tata Kelola SPBE	0,53	Strategi dan Perencanaan	0,57
Kebijakan Layanan SPBE	1,47	TIK	0,57
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>1,79</b>		
Administrasi Pemerintahan	1,36		
Pelayanan Publik	0,42		

Dari hasil penilaian tersebut, maka capaian SPBE Kemenko Kemaritiman dalam kategori cukup, dan masih di bawah rerata SPBE nasional, kecuali jika dibandingkan dengan rerata SPBE tingkat kabupaten se Indonesia.

**Tabel 13 Nilai Rerata Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2019**

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	<b>1,98</b>	<b>2,97</b>	<b>2,73</b>	<b>2,06</b>	<b>2,27</b>	<b>1,77</b>	<b>2,17</b>
Domain Kebijakan	1,75	2,68	2,36	1,76	2,05	1,53	1,90
Kebijakan Tata Kelola	1,64	2,45	2,20	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,10	1,61	1,94
Domain Tata Kelola	1,74	2,71	2,67	2,08	2,08	1,50	1,90
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencanaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,88	2,89	2,21	2,13	1,53	1,90
Domain Layanan SPBE	2,17	3,20	2,87	2,14	2,44	1,98	2,39
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,61	2,63	2,15	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	1,92	2,12	1,66	2,13

Dari hasil evaluasi oleh KemenPANRB, terdapat kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan SPBE di Kemenko Kemaritiman, yaitu:

1. Kebijakan Tata Kelola: Kementerian telah memiliki kebijakan tentang tim pengarah SPBE berarti telah mendukung upaya penerapan SPBE secara umum. Kementerian belum mencantumkan dalam kebijakannya yang nyata masalah tentang integrasi proses bisnis, rencana induk SPBE, anggaran dan belanja TIK, pengoperasian pusat data, integrasi sistem aplikasi dan aplikasi umum berbagi pakai.
2. Kebijakan Layanan: Kementerian telah memiliki kebijakan tentang layanan di bidang naskah dinas, manajemen kepegawaian, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, pengadaan, pengaduan publik, dokumentasi dan informasi hukum, *whistle blowing system* dan publik instansi pemerintah. Kementerian dapat meningkatkan performa dengan menambahkan item layanan yang berintegrasi dengan instansi lain dan dilakukan evaluasi secara

- berkala. Kebijakan tentang layanan dokumentasi dan informasi hukum juga perlu dituangkan secara tertulis.
3. Kelembagaan: Kementerian telah memiliki tim pengarah SPBE berarti ada komitmen untuk melaksanakan SPBE. Kementerian belum menetapkan tugas pokok masing-masing anggota tim SPBE sehingga belum bisa bergerak sesuai dengan tugas pokok masing-masing secara optimal, serta belum memetakan proses bisnis yang terintegrasi antar masing-masing unit kerja.
  4. Strategi dan Perencanaan: Kementerian telah memiliki rencana induk SPBE. Namun Kementerian belum memasukkan anggaran dan belanja TIK lengkap beserta tahun penerapannya ke dalam dokumen rencana induk SPBE. Rincian tentang belanja TIK beserta rencana tahun pelaksanaannya perlu didefinisikan dengan jelas.
  5. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Kementerian telah memahami arti pentingnya penerapan SPBE, dan menerapkan sebagian aplikasi umum berbagai pakai pada sebagian unit kerja. Kementerian belum membangun pusat data, belum melakukan integrasi sistem aplikasi dan menerapkan aplikasi umum berbagai pakai terhadap seluruh unit kerja di lingkungan kementerian. Langkah lebih ke depannya, menyiapkan agar hal semua diatas dapat terintegrasi dengan kementerian atau instansi lainnya.
  6. Administrasi pemerintahan: Kementerian telah menerapkan untuk sebagian unit kerjanya yaitu layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian, manajemen perencanaan, keuangan, manajemen kinerja dan pengadaan. Kelemahan kementerian belum menerapkan semua layanan diatas terhadap semua unit kerjanya sehingga nantinya akan bisa dilakukan integrasi terhadap semua unit kerja. Jika diteruskan dapat dilakukan integrasi dengan kementerian atau instansi lainnya.
  7. Pelayanan Publik Kekuatan: Kementerian telah menyediakan sebagian layanan publik yang berbasis elektronik diantaranya adalah informasi tentang dokumentasi dan informasi hukum. Kelemahan kementerian masih belum banyak menampilkan informasi atau memberikan layanan terhadap publik yang berbasis elektronik diantaranya adalah aplikasi pengaduan publik, *Whistle Blowing System*, dan beberapa aplikasi yang di buat sendiri sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

#### **IKP.4 Tingkat Opini BPK**

Tingkat opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Formula yang digunakan adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur Tingkat Opini BPK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. IKP.4 ini ditargetkan pada triwulan II dengan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecuali (WTP).

Kemenko Kemaritiman dalam pengelolaan (perencanaan, pengajuan pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan) pada tahun kedua setelah pelaporan penggunaan anggaran satker tersendiri, telah berhasil mencatatkan laporan keuangan yang wajar dalam pemeriksaan BPK dengan predikat WTP. Predikat WTP ini telah berhasil dipertahankan untuk 2 tahun anggaran berturut-turut (2016 dan 2017). Berdasarkan dua hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2018 juga ditargetkan untuk dapat kembali meraih predikat WTP.

Sesuai dengan laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Kemaritiman Tahun 2018 Nomor; 17.B/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 BPK kembali memberikan predikat WTP atau sesuai 100% dengan target yang ditetapkan.

Beberapa kondisi yang mendorong keberhasilan adalah:

1. Adanya semangat yang kuat untuk mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya (kondisi internal);
2. Semangat untuk menyamakan perolehan opini terbaik yang sama dengan opini yang diperoleh oleh sesama Kementerian Koordinator dan sebagai Kementerian yang baru dibentuk (kondisi eksternal);
3. Dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan.

Pada TA. 2018, Kemenko Kemaritiman selain ketiga hal di atas, juga telah melaksanakan efektifitas kegiatan yang berimbas pada efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) yang digunakan, dengan menerapkan penyusunan jumlah anggaran yang dibutuhkan secara proporsional dan akuntabel.

Adapun program atau kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini adalah:

1. Program peningkatan jumlah dan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
2. Program melakukan *update* standar operasi prosedur (SOP) dan aturan internal lainnya sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*);
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu atau sebagai *tools* dalam penyelesaian pekerjaan.

#### **IKP.4 Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman**

Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman adalah indikator atau hasil pengukuran sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman. Indeks Maturitas SPIP digunakan untuk mengukur pengendalian internal pelaksanaan SPIP apakah telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Maturitas merupakan istilah itu menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Penilaian maturitas dilaksanakan dengan

beberapa aspek, yaitu aspek desain dan aspek penerapan. Aspek desain pengendalian intern (*control design*) dan kedua adalah dari aspek penerapannya (*control implementation*). Aspek desain menyangkut masalah ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi. Aspek penerapan terkait erat dengan efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian yang ada. Dengan demikian, organisasi yang maturitas sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya.

Satuan ukurnya adalah level maturitas. Level itu ditentukan misalnya dengan membuat skala dari level 0 sampai level 5. Level 0 menunjukkan tidak adanya pengendalian intern, sementara level 1 sampai level 5 menunjukkan adanya pengendalian intern dengan gradasi dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi berdasarkan parameter tertentu. Artinya, parameter pada level 2 adalah seluruh parameter level 1 ditambah parameter tertentu, parameter level 3 adalah parameter level 2 ditambah lagi parameter lainnya, dan demikian seterusnya. Organisasi yang memenuhi parameter level 5 berarti telah memenuhi seluruh parameter pada level-level di bawahnya. Selain sebagai alat ukur, pelevelan ini nantinya dapat menjadi sarana organisasi merancang rencana tindak (*action plan*) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menuju level yang lebih tinggi. Misalnya maturitas sistem pengendalian intern suatu organisasi telah berada pada level 3, maka selanjutnya ia dapat merancang rencana tindak peningkatan maturitas dengan mengacu pada parameter level 4 dan level 5.

Pedoman penilaian SPIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut penilaian merinci level maturitas SPIP menjadi enam tingkatan sebagai berikut:

**Tabel 14 Level Maturitas SPIP kementerian Kemaritiman**

No	Level	Keterangan
1	Belum ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern.
2	Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan.
3	Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya.
4	Terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai.
5	Terkelola dan terukur	Pengendalian intern diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi.
6	Optimum	Pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis.

Penilaian maturitas dilakukan melalui:

1. Penilaian pendahuluan, yaitu dengan melakukan survei persepsi maturitas, validasi awal hasil survei dan perhitungan skor awal maturitas SPIP
2. Pengujian bukti maturitas, yaitu dengan mengumpulkan data rinci maturitas SPIP melalui teknik pengumpulan data lainnya seperti kuesioner lanjutan, wawancara, reviu dokumen, atau observasi. Pengumpulan bukti maturitas SPIP ini dilakukan untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa hasil survei persepsi maturitas telah mencerminkan kondisi tingkat maturitas SPIP yang sebenarnya.

### 3.1.2. Sasaran Program (SP) 2

#### **Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Tujuan dari sasaran program ini adalah di Kemenko Kemaritiman adalah tersedianya saluran atau sarana (teknologi informasi komunikasi yang handal) yang dapat dipakai untuk melakukan pengelolaan informasi secara elektronik sekaligus dapat mempublikasikannya, program dan kegiatan di lingkup Kemenko Kemaritiman. Sasaran Program ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja (IKP.5) yaitu: **Persentase Kepuasan Layanan Teknologi Informasi Komunikasi**. Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

Persentase kepuasan layanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) adalah seberapa besar/banyak pengguna informasi merasakan puas akan layanan pengelolaan sistem informasi tersebut. Tujuan penetapan IKP ini adalah untuk mengetahui apakah informasi tersebut benar-benar tersedia untuk meningkatkan kapabilitas Kemenko Kemaritiman dalam memberikan layanan Teknologi Informasi kepada pengguna. Formula pengukurannya adalah dengan menggunakan hasil survey tingkat kepuasan publik.

Dalam meraih kepuasan pengguna layanan, maka pengelolaan aset TIK yang baik mutlak diperlukan. Pengelolaan aset TIK merupakan seperangkat praktek bisnis yang bergabung baik dalam hal keuangan, fungsi kontrak dan persediaan untuk mendukung manajemen siklus hidup dan pengambilan keputusan strategis dalam lingkungan TIK. Aset dalam hal ini mencakup semua elemen dari perangkat lunak dan perangkat keras yang beroperasi dan berada di lingkungan organisasi. Manajemen aset TIK merupakan bagian penting dari strategi organisasi untuk mencapai proses bisnisnya. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi rinci mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang kemudian akan digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelian, pemutakhiran, pemeliharaan dan redistribusi perangkat tersebut serta peningkatan layanan operasional TIK tersebut. Dengan manajemen aset TIK akan membantu organisasi untuk mengelola sistem secara lebih efektif dan menghemat waktu dan uang untuk menghindari pembelian aset yang memiliki nilai operasional fungsi kecil dan melalui pengelolaan aset dapat memberikan layanan TIK andal dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Untuk itu, dalam rangka mengetahui dan menganalisa kualitas layanan TIK dalam konteks pengelolaan TIK, maka diperlukan suatu upaya antara lain dengan cara: survey kepuasan layanan, peningkatan mutu sistem yang memenuhi standar internasional serta hasil monitoring kinerja perangkat keras TIK.

Pada pengukuran IKP ini menggunakan metode survey yang dilakukan secara acak pada para pegawai (Eselon III, Eselon IV, staf pelaksana dan tenaga kontrak) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Disamping dengan metode survey, Bagian Data dan Informasi, BIH juga melakukan pemantauan perangkat-perangkat TIK yang dilakukan melalui *Simple Network Management Protocol* (SNMP), merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP (*Internet Protocol*). Peralatan-peralatan itu antara lain *switch, router, modem, komputer, server* dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi UDP dengan peralatan (*device*) yang masuk dalam jaringan tersebut. SNMP dapat meminta data ataupun melakukan setting kepada peralatan yang bersangkutan, meliputi: *Server, Router, Core Switch, Access Switch, Access Point* yang di monitor kinerja perangkat tersebut dalam menyediakan kemampuannya untuk mentransmisi paket data dan ketersediaan transmisi data.

Berikut ini indikator atau kriteria survey kepuasan layanan dengan tiga kategori kepuasan (puas, cukup puas, dan tidak puas):

**Tabel 15 Kriteria dan Hasil Survei Kepuasan TIK**

No	Dimensi Survei	No	Dimensi Survei
1	-Koneksi internet -Bandwidth internet	5	-Perbaikan gangguan laptop/PC -Instalasi <i>software</i> untuk laptop/PC
2	-Kemudahan komunikasi <i>email</i> -Kuota penyimpanan <i>email</i>	6	-Kemudahan akses <i>vicon</i> -Kecepatan komunikasi <i>vicon</i>
3	- <i>User friendly</i> NDE -Akses NDE	7	-Supervisi pembuatan aplikasi
4	-Lisensi MS Windows 10 -Lisensi MS Office Home Business -Lisensi Antivirus Internet Version	8	-Pemberian sub domain ( <a href="http://maritim.go.id">maritim.go.id</a> ) -Gejala gangguan domain/sub domain

Selain dari hasil survei juga dilaporkan monitoring kinerja perangkat jaringan yang dilaporkan melalui SNMP, adapun kinerja perangkat tersebut dilihat dari beberapa parameter antara lain *availability, response time, dan packet loss* serta *utilization*.

Gambaran umum pemantauan jaringan pada perangkat jaringan yang umumnya menggunakan *Simple Network Management Protocol* (SNMP) untuk mengumpulkan data yang keluar-masuk perangkat jaringan. Dengan adanya monitoring perangkat jaringan memungkinkan pengelola jaringan untuk memahami bagaimana masalah antara satu perangkat perangkat lain yang saling terhubung.

Tergantung pada alat pemantau ketersediaan (*availability*) yang dipilih oleh manajer jaringan, *availability* itu juga dapat menentukan perilaku dan status perangkat jaringan dan memberikan peringatan dan laporan tentang anomali jika menunjukkan masalah.

Monitoring perangkat jaringan ini menjalankan fungsi memantau jaringan, melacak pemanfaatan *bandwidth*, waktu aktif, ketersediaan dan waktu respons dari perangkat jaringan, dan mereka memberikan informasi terperinci tentang status komponen perangkat individual, seperti *port*, memori, *prosesor* dan catu daya. Banyak dari alat ini bahkan menyajikan laporan *dashboard* tentang kesehatan dan status perangkat jaringan, menggunakan isyarat visual seperti indikator hijau, kuning dan merah untuk memberi tahu pengelola jaringan tentang keandalan kemampuan perangkat dan komponen perangkat. Beberapa analisa teknis yang digunakan di lingkup Kemenko Kemaritiman untuk menilai keandalan dari sistem jaringan, *hardware* dan *software* TIK adalah:

1. *Availability* adalah ketersediaan perangkat jaringan bahwa suatu sistem beroperasi pada periode waktu tertentu dengan satuan persentasi yang menunjukkan jumlah waktu suatu perangkat benar-benar beroperasi sebagai persentase dari total waktu yang seharusnya dioperasikan.
2. *Response time* adalah jumlah total waktu yang diperlukan untuk menanggapi permintaan yang perlu diproses dalam ms (*mile second*). Dengan kata lain *response time* berkaitan dengan total waktu antara permintaan untuk suatu proses layanan dan pemenuhan permintaan layanan itu. Semakin besar nilai persentasi *response time*-nya semakin besar sibuk perangkat tersebut melakukan pemenuhan terhadap permintaan suatu proses tersebut.
3. *Packet Loss* adalah suatu paket dalam perangkat jaringan yang hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang keluar-masuk perangkat jaringan gagal mencapai tujuan akhirnya. *Packet Loss* dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengiriman data, misalnya gangguan di jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan karena jalur padat dan kecil saluran pitanya.
4. *Utilization* adalah berapa besar persentasi kesibukan perangkat dalam melayani/memproses suatu proses yang perlu diselesaikan.

Sebagai tambahan juga, dalam rangka meningkatkan layanan TIK, berbagai upaya ditempuh untuk meningkatkan keamanan informasi dunia *cyber*, antara lain:

1. Tahun 2018 telah mengimplementasikan *Internet Protocol* masa depan yaitu *Internet Protocol Version 6* (IPv6).
2. Keamanan informasi *website* dan aplikasi berbasis *web* berdasarkan hasil *assessment* oleh beberapa pihak internasional.
3. Kemenko Kemaritiman juga sudah mencapai nilai yang sangat baik dalam segi keamanan kriptografi penggunaan SSL berdasarkan *assessment* dari pihak internasional.

### 3.1.3. Sasaran Program (SP) 3

#### Meningkatnya Layanan Kehumasan

Sasaran SP.4 ini adalah: meningkatnya layanan kehumasan (jumlah dan frekuensi materi informasi, pemanfaatan media baik arus utama maupun sosial, penyusunan strategi komunikasi, serta membangun opini dan menjaga citra positif organisasi) di lingkungan Kemenko Kemaritiman. SP.4 ini ditetapkan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kehumasan sebagai alat untuk memperkenalkan Kemenko Kemaritiman dan program-program serta capaiannya kepada masyarakat secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan menyeluruh.

SP.4 hanya memiliki 3 (tiga) indikator kinerja (IKP.7) dengan capaian pada triwulan I ini adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 16 Target dan Capaian SP.4 Triwulan II TA. 2019**

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Publikasi	3,57	70%	160%	120
2	Persentase Opini Publik yang Positif	5,71	70%	91%	115
3	Persentase Layanan Dokumentasi	4,29	70%	233%	120
<b>Nilai Capaian SP.1</b>					<b>117,89</b>

Realisasi SP.4 pada triwulan II TA. 2019 adalah 70% atau 96,06% dari target (80%). SP.4 ini merupakan SP yang baru ditetapkan tahun ini.

Rincian hasil dan penjelasan capaian SP. 4 adalah sebagai berikut:

#### **IKP.7 Persentase Publikasi**

Persentase Publikasi adalah persentase publikasi dan informasi publik yang telah dibuat (dipublikasikan) terkait kegiatan Kemenko Kemaritiman dibandingkan dengan yang direncanakan. Tujuan IKP.7 ini adalah Untuk mengukur capaian pelaksanaan publikasi dan pembuatan/penyediaan informasi publik. IKP.7 ini ditargetkan untuk mengukur capaian publikasi dan pembuatan/penyediaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Bagian Humas Kemenko Kemaritiman.

Berdasarkan capaian selama triwulan II TA. 2019, Bagian Humas berhasil merealisasikan capaian kegiatan publikasi sebesar 132,29% dari target/rencana yang ditentukan. Capaian ini jauh lebih baik dibanding capaian pada triwulan sebelumnya. Capaian publikasi yang telah diselesaikan/dilaksanakan pada triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Konferensi Pers: *Coffee Morning* bersama Menko Kemaritiman; *Influencer Gathering* Gerakan Indonesia Bersih bersama Menko Bidang Kemaritiman; Konferensi Pers “*Afternoon Tea* Bersama Menko Luhut Binsar Pandjaitan; dan Konferensi Pers “Perkembangan Penanganan Kasus Pencemaran Tumpahan Minyak Montara”

2. Penerbitan Majalah Kemaritiman 1 edisi
3. Placement Advertorial di Media Massa: “Bersatu Untuk Indonesia yang Lebih Baik” (Koran Sindo); “Kehadiran Marina Bisa Sumbang Jutaan Wisman ke Indonesia” (Merdeka.com); dan “Atasi Sampah Laut, Kemenko Kemaritiman Tekankan Ketersediaan Data Jumlah Sampah yang Akurat” (Liputan6.com)

### **IKP.8 Persentase Opini Publik yang Positif**

Persentase opini publik yang positif adalah ukuran untuk menilai kualitas opini publik yang positif. Opini yang positif adalah opini yang menganggap bahwa kegiatan dan atau capaian yang dianggap baik, benar atau memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan negara. IKP.8 ini ditargetkan untuk mengukur capaian opini publik yang positif terhadap pemberitaan bidang kemaritiman di media massa (elektronik). IKP.8 ini dihitung dengan membandingkan beritabidang kemaritiman yang beropini positif dengan total berita bidang kemaritiman.

Pelaksanaan media monitoring dilaksanakan untuk dapat melakukan analisa terhadap muatan pemberitaan yang positif, netral atau negatif. Media yang dijadikan basis penilaian adalah media online utama (mainstream) yang mempunyai pembaca dalam jumlah besar. Berdasarkan capaian selama triwulan II TA. 2019, Bagian Humas berhasil merealisasikan capaian pemberitaan positif bidang kemaritiman sebesar 91% atau 115% dari target yang ditentukan. Rincian muatan pemberitaan tersebut adalah sebagaimana berikut:

**Tabel 17 Rekap Jumlah Opini Pemberitaan Bidang Kemaritiman**

No	Tanggal pemberitaan	Opini			Total
		Positif	Negatif	Netral	
1	1 – 7 April 2019	20	2	-	21
2	8 – 14 April 2019	17	1	-	18
3	15 – 21 April 2019	7	1	-	8
4	22 – 28 April 2019	9	1	-	10
5	29 April – 2 Mei 2019	17	1	2	20
6	6 – 12 Mei 2019	9	2	1	12
7	13 – 19 Mei 2019	8	1	2	11
8	20 – 26 Mei 2019	24	2	2	28
9	27 Mei – 2 Juni 2019	63	-	3	66
10	3 – 9 Juni 2019	8	-	2	10
11	10 – 16 Juni 2019	40	1	4	45
12	17 – 23 Juni 2019	85	-	2	87
13	24 – 30 Juni 2019	97	-	8	106
<b>TOTAL</b>		<b>404</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>442</b>

### **IKP.9 Persentase Layanan Dokumentasi**

IKP.9 disusun dan ditargetkan dengan tujuan untuk mengukur capaian layanan dokumentasi kegiatan di lingkup Kemenko Kemaritiman (peliputan kegiatan pimpinan, baik Menteri, maupun kegiatan sekretariat atau kedeputian). Pada triwulan II TA. 2019 ini, Bagian Humas berhasil merealisasikan target IKP.9 ini sebesar 191,43% dari target yang ditentukan, yang dalam penilaian ini diambil nilai maksimal capaian 120%.

Rincian pendokumentasian yang berhasil dilaksanakan sebagai penghitungan capaian IKP.9 ini adalah kegiatan:

1. Reportase dan pendampingan kunjungan kerja Menko Kemaritiman
2. Reportase dan pendampingan kunjungan kerja Deputi
3. Reportase dan pendampingan kunjungan kerja Staf Ahli Menteri dan Sekretaris Kemenko
4. Siaran Pers Kementerian

### **3.1.4. Sasaran Program (SP) 4**

#### **Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif**

Tujuan sasaran program tersedianya layanan persidangan yang efektif adalah mengupayakan tersedianya layanan persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran program ini memiliki 1 indikator kinerja (IKU.6) yaitu: **Persentase Kepuasan Layanan Persidangan**. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan layanan persidangan. Indikator ini memiliki bobot 5,71. Sementara target capaian IKP.6 ini adalah 80%. Indikator ini juga merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

Persentase kepuasan layanan persidangan adalah persentase tingkat kepuasan konsumen (peserta) terhadap layanan persidangan. Formula untuk mendapatkan nilai indikator ini adalah dengan menggunakan hasil survey. Survey dilaksanakan dengan sistem *random sampling* pada peserta persidangan yang diadakan oleh Kemenko Kemaritiman pada rapat koordinasi antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan baik di kantor maupun luar kantor Kemenko Kemaritiman.

IKU.10 ini merupakan perbaikan penamaan dari IKU pada tahun sebelumnya (tingkat kepuasan layanan persidangan). Selain pernyataan tingkat kepuasan peserta survey juga diminta mengisi catatan/saran (tidak wajib) sebagai bahan untuk peningkatan layanan persidangan. Survei berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terdiri atas Pejabat dan Staf Lintas Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/Perusahaan yang mengikuti rapat koordinasi tingkat Menteri di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman. Responden diminta untuk mengisi mengenai data responden, pendapat responden tentang pengelolaan rapat koordinasi untuk menilai tingkat kepuasan responden, dan

responden diminta untuk memberikan masukan dan saran terhadap pengelolaan rapat koordinasi sebagai bahan untuk peningkatan layanan persidangan.

Pada Triwulan II Tahun 2019, presentase kepuasan layanan persidangan berdasarkan kuesioner mencapai 87% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Hasil tersebut juga meningkat dari presentasi kepuasan berdasarkan survei pada tahun lalu yang mencapai 80% dari target 70% yang telah ditetapkan. Pada Triwulan II Tahun 2019, transkrip yang ada berjumlah 29 dengan jumlah bahan rapat koordinasi yang terkumpulkan berjumlah 27 dari target 20 dan bahan dari rapat terbatas berjumlah 6 dari target yang berjumlah 5. Lebih lanjut, jumlah risalah pada Triwulan II Tahun 2019 mencapai 36 buah risalah dari target sebesar 30 buah risalah. Peningkatan pencapaian presentase kepuasan layanan persidangan dan kinerja tercapai berkat optimalisasi manajemen yang telah ada dan inovasi penggunaan teknologi informasi maupun pengadaan peralatan yang mempermudah dalam penyiapan, penyelenggaraan dan perumusan serta pendistribusian sidang maupun rapat koordinasi tingkat Menteri.

Untuk mendukung layanan persidangan, Kemenko Kemaritiman telah melakukan optimalisasi penggunaan alat Notula sebagai alat perekaman persidangan (rakor) dan transkrip dari rekaman suara ke dalam file tulisan. Sehingga, pencatatan proses pelaksanaan dan hasil persidangan dapat disusun dengan lebih cepat, serta hasilnya lebih akurat. Pada tahun ini Kemenko Kemaritiman telah melakukan pengadaan alat *Switcher* untuk mempermudah penyelenggaraan rapat koordinasi dan *Security Paper* sebagai bahan hasil persidangan yang memiliki keamanan untuk didistribusikan kepada pihak eksternal. Penggunaan *Barcode* dan *Bitly* sebagai *URL shorter* sebagai link media untuk mengunduh bahan presentasi rapat koordinasi yang telah diijinkan, telah diaplikasikan untuk mempermudah dan mempercepat peserta rapat mendapatkan bahan paparan.

Lebih lanjut, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dalam penyiapan bahan sidang, penyelenggaraan dan perumusan serta pendistribusian sidang maupun rapat koordinasi tingkat Menteri dapat menjadi prioritas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Layanan Persidangan yang Efektif.

Beberapa hal yang dilakukan untuk peningkatan layanan tersebut adalah:

1. Fasilitas sarana dan prasarana dalam penyiapan bahan sidang dan penyelenggaraan sidang/rakor tingkat Menteri agar lebih ditingkatkan
2. Hasil rakor agar lebih cepat disampaikan kepada peserta sidang
3. Undangan rakor agar lebih awal disampaikan kepada peserta rapat

### **3.1.5. Sasaran Program (SP) 5**

#### **Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi**

Sasaran program ini memiliki 3 (tiga) IKP dengan realisasi pada triwulan II TA. 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18 Target dan Capaian SP.5 Triwulan I TA. 2019**

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	4,29	80	71,43	94,64
2	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	4,29	80	100	112,50
3	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	4,29	80	66,67	91,88
<b>Nilai Capaian SP.1</b>					<b>99,67</b>

Rincian hasil dan penjelasan capaian SP. 5 adalah sebagai berikut:

### **IKP.11 Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**

Persentase capaian layanan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah fasilitas/layanan penyusunan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdiri dari penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dan Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko), yang ditetapkan berbanding dengan jumlah Permenko dan Kepmenko yang diusulkan. Maksud dari layanan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya tersedianya peraturan/ keputusan Menko dalam menunjang tugas dan fungsi Kemenko Kemaritiman sehingga target kegiatan dan kinerja dapat tercapai

Tujuan dari layanan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Tersedianya Permenko yang ditetapkan dan/atau diundangkan Menko sebagai kebutuhan pengaturan atau regulasi terhadap suatu permasalahan
2. Tersedianya Keputusan Menteri Koordinator yang ditetapkan Menteri Koordinator sebagai suatu payung hukum penetapan suatu kegiatan.
3. Adanya penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap suatu usulan rancangan Permenko yang belum memenuhi kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan atau belum harmonis sebagai peraturan perundang-undangan.
4. Tersedianya Keputusan Eselon I yang ditetapkan dari pengajuan rancangan Kepmenko sebagai suatu payung hukum penetapan suatu kegiatan.

Pada triwulan II TA. 2019 telah ditetapkan target untuk dapat menghasilkan 7 peraturan dan atau keputusan. Sementara itu realisasi yang berhasil dicapai adalah 5 peraturan dalam bentuk Permenko/Kepmenko. Sehingga realisasi IKP ini pada triwulan II adalah 71,43% (5/7) atau 94,64 % dari target (80 %).

Rincian peraturan/keputusan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 19 Peraturan Perundang-undangan TW II Tahun 2019**

No	Jenis	Judul	Pemrakarsa	Penyampaian ke biro informasi dan hukum	Penetapan/Pengundangan
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman <b>Nomor 1 Tahun 2015</b> tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Sekretariat Kementerian Koordinator	Pengajuan Maret Tahun 2019	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2019 tanggal <b>16 April 2019</b> tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458 tanggal <b>23 April 2019</b>
2.	Peraturan Menteri	Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Inspektorat	Pengajuan Januari 2019	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 3 Tahun 2019 tanggal <b>17 Mei 2019</b> tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 582 tanggal <b>21 Mei 2019</b>
3.	Keputusan Menteri	Pemanfaatan Ex Kapal Republik Indonesia TNI- AL (KRI TNI-AL) Menjadi Destinasi Wisata dan Museum	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Pengajuan Februari 2019	Keputusan Menteri Koordinator Nomor 81 Tahun 2019 tanggal <b>16 April 2019</b>
4.	Keputusan Menteri	Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Pengajuan Maret 2019	Keputusan Menteri Koordinator Nomor 84 Tahun 2019 tanggal <b>23 April 2019</b>
5.	Keputusan Menteri	Perubahan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Nias 2019	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim	Pengajuan April 2019	Keputusan Menteri Koordinator Nomor 88 Tahun 2019 tanggal <b>7 Mei 2019</b>

## **IKP.12 Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum**

Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum adalah fasilitasi/koordinasi pertimbangan dan bantuan hukum yang didalamnya terdiri atas 4 (empat) layanan berupa dokumen RANHAM 2019; Dokumen RAN P4GN; Dokumen Kajian Hukum Bidang Kemaritiman dan Dokumen Bantuan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) yang dilaksanakan dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berbanding dengan jumlah target layanan yang telah ditetapkan.

Maksud dari Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum adalah sebagai upaya optimalisasi layanan di bidang hukum bagi tercapainya target Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam implementasi RANHAM, RAN P4GN, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum (litigasi dan non litigasi).

Fasilitasi dan koordinasi pertimbangan dan bantuan hukum bertujuan:

1. Optimalisasi terhadap koordinasi, penyeliaan, dan pemenuhan target RANHAM 2019 terhadap Kementerian dalam Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu KKP dan Kementerian Perhubungan, sehingga memenuhi target sebagaimana komitmen yang telah disampaikan kepada Sekretariat Bersama RANHAM.
2. Optimalisasi terhadap pemenuhan target Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam penyeliaan internal serta pewujudan interdiksi penyelenggaraan RAN P4GN sebagaimana komitmen yang telah disampaikan kepada BNN.
3. Optimalisasi pelaksanaan pertimbangan hukum melalui forum kajian hukum di bidang kemaritiman sebagai bentuk dukungan bagi implementasi PMPRB area penataan hukum, dukungan implementasi PPID, serta layanan drafting naskah kerjasama/MoU di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
4. Optimalisasi pelaksanaan dukungan bantuan hukum baik litigasi

Pada triwulan II TA. 2019 telah ditetapkan 4 (empat) fasilitasi/koordinasi bantuan hukum. Realisasi IKP ini adalah 100% (seluruh target dapat direalisasikan) atau 112,50% dari target (70%). Keempat dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RANHAM 2019

Koordinasi RANHAM TW II telah diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2019 dengan agenda koordinasi target capaian B06 Tahun 2019 terhadap KKP dan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Biro Informasi dan Hukum. Biro Informasi dan Hukum juga telah melaksanakan penyeliaan terkait Target B03 Rencana Aksi HAM Kementerian Perhubungan cq. Terminal Tipe A Alang Alang Lebar, Palembang pada tanggal 11-13 April 2019.

2. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Narkoba) P4GN 2019

Sosialisasi RAN P4GN 2019 B06 telah diselenggarakan dengan pemasangan 12 standing banner di 12 lantai gedung Kementerian Koordinator sebagai upaya reduksi potensi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 9 Mei 2019.

3. Dokumen Kajian Hukum Bidang Kemaritiman

a. Pertimbangan hukum dan asistensi dalam penyusunan perjanjian kerjasama dan MoU diantaranya adalah:

- Kesepahaman Bersama Kemenko Maritim dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT. Pelabuhan Indonesia I dan PT. Pelabuhan Indonesia II dan PT. Pelabuhan Indonesia III dan PT. Pelabuhan Indonesia IV tentang Implementasi Program Green Port di Pelabuhan (Deputi II) pada tanggal 7 Mei 2019.
  - Perjanjian Kerjasama Kemenko Maritim dan PT. Elex Media Komputindo tentang Inovasi produk kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 April 2019.
  - Perjanjian Kerjasama Kemenko Maritim dan PT. BRI tentang Penerbitan Business Card pada tanggal 30 Juni 2019.
- b. Selain itu Biro Informasi dan Hukum juga telah melakukan kajian hukum tentang Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 dan 29 Mei 2019.
- c. Biro Informasi dan Hukum memberikan telaahan terhadap 3 (tiga) Perubahan Permenko diantaranya adalah Permenko Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Permenko Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip, Permenko Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, serta satu usulan Permenko baru tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan format ulang berdasarkan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fasilitasi terhadap kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019.
4. Dokumen Bantuan Hukum (Litigasi dan non Litigasi)  
Biro Informasi dan Hukum telah melaksanakan asistensi/ monitoring akselerasi pembangunan Galeri BMKT di Kabupaten Karawang Jawa Barat yang terkendala dalam pemenuhan sarana dan prasarannya.  
Selain itu juga melaksanakan Kegiatan Koordinasi terkait Kajian Hukum Analisis & Evaluasi Implementasi Law Inforcement Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Komparasi terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Pelabuhan Kajawanan Cirebon pada tanggal 16-18 Mei 2019.

### **IKP.13 Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Persentase pemenuhan SOP dan tata laksana Kemenko Kemaritiman adalah jumlah tersusunnya SOP tata laksana di lingkup Kemenko Kemaritiman yang diselesaikan/terfasilitasi oleh Biro Informasi dan Hukum berbanding target pemenuhan SOP tata laksana di lingkup Kemenko Kemaritiman. Tujuan IKP.13 ini adalah untuk mengukur ketersediaan SOP dalam pelaksanaan kegiatan di Kemenko

Kemaritiman sehingga dapat menjadi pedoman dan menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pada triwulan II TA. 2019, Bagian Hukum dan Organisasi berhasil merealisasikan target pemenuhan SOP sebesar 66,67% dari target yang ditentukan. Nilai ini dicapai dari tersusunnya 2 (dua) SOP dari 3 (tiga) SOP. 2 (dua) SOP tersebut adalah SOP Pembuatan Peraturan Menteri Koordinator dan SOP Konsultasi Hukum. Pada tahun 2019 sendiri ditargetkan disusun 14 SOP baru.

### 3.1.6. Sasaran Program (SP) 6

#### Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan BMN yang Handal

Tujuan dari SP.6 ini adalah adalah jumlah pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan serta tersedianya laporan barang milik negara (BMN) yang akuntabel yang ada dalam lingkungan Kemenko Kemaritiman.

Sasaran program ini memiliki 2 (dua) IKP dengan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 20 Sasaran Program (SP) 5**

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	-	-	-
2	Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3,57	60	60,19	75,16
<b>Capaian IKP.5</b>					<b>75,16</b>

Rincian hasil dan penjelasan capaian SP.6 adalah sebagai berikut:

#### IKU.14 Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan adalah persentase jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan kompetensi manajerial, sosio kultur dan teknis yang harus dimiliki seorang PNS. Formula penghitungan yang digunakan adalah  $\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi standar Kompetensi}}{\text{Jumlah pejabat yang ada}} \times 100\%$ .

Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mengetahui persentase pejabat yang telah memiliki kualifikasi standar kompetensi jabatan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan pengembangan pegawai.

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah pegawai yang sudah memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan, yang meliputi *Soft Competency*

(kompetensi personal/bakat), *Hard Competency* (kompetensi keahlian/teknis) dan *Attitude* (perilaku). Penghitungan standar ini akan dilakukan setelah standar kompetensi sudah ditetapkan oleh Menko Bidang Kemaritiman. Standar Kompetensi Pegawai yang meliputi *Soft Competency* (kompetensi personal/bakat), *Hard Competency* (kompetensi keahlian/teknis) dan *Attitude* (perilaku).

Definisi kompetensi itu sendiri dapat dijelaskan sebagai kemampuan & karakter yang dimiliki oleh seorang pegawai, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara efektif & efisien. Berdasarkan kompetensi tersebut, maka untuk dapat menunjang kinerja pegawai maka disusunlah standar kompetensi pegawai.

Kepala Bagian Kepegawaian (definitif) yang bertanggung jawab pada IKP ini sempat kosong selama 5 (lima) bulan. Pelantikan pejabat resminya dilaksanakan pada awal triwulan IV. Kekosongan pejabat penanggungjawab dan tuntutan akan pemenuhan formasi staf dan pejabat di lingkup Kemenko Kemaritiman menyebabkan penyusunan standar kompetensi ditunda atau menjadi prioritas kedua. Beberapa target pelaksanaan yang menjadi prioritas Bagian Kepegawaian adalah: proses rekrutmen pegawai (PNS dan non PNS) di lingkungan Kemenko Kemaritiman, penyusunan *database* kepegawaian, penyusunan *roadmap* kepegawaian (termasuk perencanaan diklat, kursus, pengisian jabatan (administrator, pengawas dan jabatan fungsional), penataan administrasi kepegawaian, belum adanya jabatan fungsional analis kepegawaian dan keterbatasan jumlah staf PNS.

Sampai dengan akhir tahun 2018 dalam pengukuran kompetensi pejabat baru dilaksanakan dalam penilaian atau *assessment* kompetensi manajerial/stuktural dan sosiokultural dengan hasil penilaian sebesar 81%. Penilaian manajerial dan sosiokultural ini berbobot 50% dari keseluruhan kompetensi yang dibutuhkan.

Dapat disampaikan bahwa dalam pemenuhan kompetensi pegawai yang baik di lingkup Kemenko Kemaritiman mengalami beberapa kendala, yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan atau pengiriman pegawai untuk melaksanakan diklat mengalami kendala karena keterbatasan kursi/kesempatan diklat pada lembaga diklat yang dianggap membantu pelaksanaan diklat;
2. Kesibukan dari pada pejabat/pegawai dimasing-masing unit untuk dapat dikirim/melaksanakan diklat (fungsional/kepemimpinan);
3. Belum ada kesepakatan dengan instansi lain (kementerian/lembaga teknis) dalam cara/model pengembangan kompetensi (untuk program magang, diklat teknis, *in the job training*);
4. PNS yang masuk dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum sesuai kebutuhan.

Penyusunan dan pelaksanaan standar kompetensi pegawai Kemenko Kemaritiman belum selesai (final dilakukan). Namun beberapa capaian dalam menunjang capaian IKP ini telah dilakukan, yaitu diantaranya telah disusun/dilaksanakan: indikator faktor jabatan; evaluasi kinerja/jabatan; analisis

jabatan dan analisis beban kerja; analisa jabatan fungsional; dan seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

Setmenko Kemaritiman telah merencanakan beberapa hal dalam meningkatkan kompetensi pegawainya, yaitu:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) baik diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis
2. Memberikan kesempatan magang pegawai, baik di lingkungan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat
3. *In the Job Training*, dan
4. Seminar, *workshop*, lokakarya dan lain-lain.

### **IKP.15 Persentase Ketersediaan Sarana Kerja Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kemenko Kemaritiman adalah perbandingan jumlah sarana kerja yang tersedia dibandingkan dengan standar kebutuhan (pegawai) yang ditetapkan. Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang andal.

IKP.9 ini memiliki bobot 3,57 serta memiliki target pada triwulan II sebesar 68%. Dari total jumlah pegawai Kemenko Kemaritiman sampai dengan akhir Juni 2019 sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) orang (PNS, staf khusus, tenaga ahli, dan tenaga kontrak) telah dapat dipenuhi sarana dan prasarana kerja dan operasional kantor sebesar 69,29%, sehingga nilai capaian IKP ini adalah 100,95% dari target yang ditetapkan (setelah dihitung dengan kualitas data dukung kinerja).

**Tabel 21 Sarana dan Prasarana Kemenko Kemaritiman Triwulan II 2019**

No	Sub indikator Kinerja	Jumlah			Persentase	
		Kondisi	Target	Realisasi		
1	Ruang kerja yang sesuai dan layak	314	314	314	100,00	
2	Kendaraan dinas	Mobil	66	127	127	48,03
		Sepeda motor	19	19	19	100,00
3	Lemari-Bufet	202	240	10	22,50	
4	Komputer	331	432	111	40,74	
5	Laptop/Notebook	267	270	15	14,81	
6	Printer	217	281	64	40,57	
7	Scanner	30	33	8	130,30	
8	Proyektor	43	46	2	65,22	
9	Mesin Fotocopy	1	15	15	100,00	
10	Telepon	166	166	166	100,00	
<b>Persentase Rerata Total</b>					<b>69,29</b>	

Penurunan capaian IKP pada triwulan II TA. 2019 ini dibandingkan dengan triwulan I (75,16%). Peningkatan signifikan ini terjadi dikarenakan ada perbaikan atau penambahan sarana/prasarana kantor serta perbaikan data dukung (pada triwulan I kualitas data dukung capaian kinerja rendah, sehingga tidak diakui penuh 100% sesuai pengakuan capaian). Sementara jika dibandingkan dengan target jangka menengah (80%), maka realisasi triwulan ini masih kurang cukup jauh (10,71%).

**Tabel 22 Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Triwulan 1 2019**

No	Sub Indikator Kinerja	Kondisi	Target	Realisasi	
				Unit	%
1	Ruang Kerja yang sesuai dan layak	314	314	314	100
2	Kendaraan Dinas	Mobil	66	127	100
		Sepeda Motor	19	19	100
3	Lemari-Bufet	202	240	19	7,92
4	Komputer	331	432	96	22,22
5	Laptop/Notebook	267	270	15	5,56
6	Printer	217	281	64	22,78
7	Scanner	30	33	22	66,67
8	Proyektor	43	46	17	36,96
9	Mesin fotokopi	1	15	15	100
10	Telepon	166	166	166	100
<b>Persentase Rerata Total</b>					<b>60,19</b>

Efisiensi sumber daya yang digunakan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana adalah dengan melaksanakan proses pemeliharaan rutin bagi sarana dan prasarana kerja sehingga akan menghasilkan efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru. Bertambahnya jumlah pegawai (mutasi dan CPNS) adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan target IKP ini. Pertambahan pegawai secara otomatis akan membutuhkan sarana dan prasarana kerja yang lebih banyak dan kompleks.

### 3.1.7. Sasaran Program (SP) 7

#### **Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Akurat**

Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat adalah terlaksananya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel. Sasaran Program (SP.6) ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 23 Sasaran Program (SP) 6**

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-	10,12	100	99,12
2	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	4,29	7,60	75	111,82
3	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	-	7,60	90	100,27
<b>Capaian SP.6</b>					<b>103,74</b>

### **IKP.16 Persentase Penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pelaksanaan kegiatan implementasi SAKIP dilaksanakan sebagai implementasi ketentuan berikut ini:

1. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Pasal 27 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Penilaian pelaksanaan SAKIP meliputi: perencanaan kinerja, perjanjian kinerja pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan reuiv kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dilakukan inventarisasi rincian SAKIP yang telah dilaksanakan, kemudian dilakukan perhitungan dengan membandingkan rincian SAKIP yang dilaksanakan dengan kewajiban yang harusnya ada.

Formula penghitungan persentase penerapan SAKIP adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang telah melaksanakan SAKIP}}{\text{Jumlah Unit Kerja Es I}} \times 100\%$$

Secara garis besar, seluruh unit Eselon 1 di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah menerapkan SAKIP pada TA. 2018 adalah 98,24%.

Walaupun masih masih terdapat keterlambatan penyusunan dokumen sesuai jadwal dan kekurangan sesuai pedoman yang ada, baik secara substansi maupun kerangka acuannya. Rincian pelaksanaan SAKIP dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 24 Rincian Capaian Pelaksanaan SAKIP Triwulan II TA. 2019**

No	Komponen	Unit					
		Kemenko	Setmenko	Dep 1	Dep 2	Dep 3	Dep 4
1	Renstra 2015 - 2019	√	√	√	√	√	√
2	Renja 2018	√	√	√	√	√	√
3	DIPA/RKA-KL 2018	√	√	√	√	√	√
4	Perjanjian Kinerja Menteri	√					
5	Perjanjian Kinerja Eselon I		√	√	√	√	√
6	Perjanjian Kinerja Eselon II		√	√	√	√	√
7	Perjanjian Kinerja Eselon III		√	√	√	√	√
8	Perjanjian Kinerja Eselon IV		-	√	√	√	√
9	Pengelolaan Data Kinerja	√	√	√	√	√	√
10	Laporan Kinerja Tahun 2017	√	√	√	√	√	√
11	Laporan Kinerja Interim Triwulan I	√	√	√	√	√	√
12	Laporan Kinerja Interim Triwulan II	√	√	√	√	√	√
13	Laporan Kinerja Interim Triwulan III	√	√	√	√	√	√
10	Renja 2019	√	√	√	√	√	√
11	DIPA/RKA-KL 2019	√	√	√	√	√	√
	<b>Jumlah (%)</b>	<b>100</b>	<b>92,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (91,00%), maka pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan 7,24%. Capaian IKP ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) masih kurang 1,76%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang capaian IKU ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Jika pada tahun 2017 dan 2018 pengukuran capaian penerapan SAKIP baru sampai pada level Eselon.

Dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tidak disebutkan secara jelas kewajiban unit Eselon II yang bukan satuan kerja (Eselon II di lingkungan Kemenko Kemaritiman bukan satuan kerja mandiri) untuk menerapkan SAKIP. Namun direkomendasikan agar pada tahun berikutnya pelaksanaan (perhitungan) entitas/unit kerja yang menerapkan SAKIP di lingkungan Kemenko Kemaritiman dapat sampai level Eselon II.

Pengumpulan dokumen SAKIP tersebut juga telah diunggah dalam sistem E-SAKIP Reviu (sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran)

### **IKP.17 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran adalah Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara kuantitatif mengukur kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akuntabilitas pada saat pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA ini merupakan indikator yang baru ditetapkan tahun 2018. Penghitungan capaian indikator ini adalah menggunakan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. IKPA ini ditargetkan setiap triwulan, dengan target pada akhir tahun 2019 adalah 90.

Indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian yang meliputi 12 (dua belas) komponen dengan cara penghitungan masing-masing indikator adalah mengkalkulasi setiap indikator dengan bobot masing-masing yang telah ditentukan. Hasil perhitungan nilai IKPA triwulan II adalah sebagaimana tabel berikut:

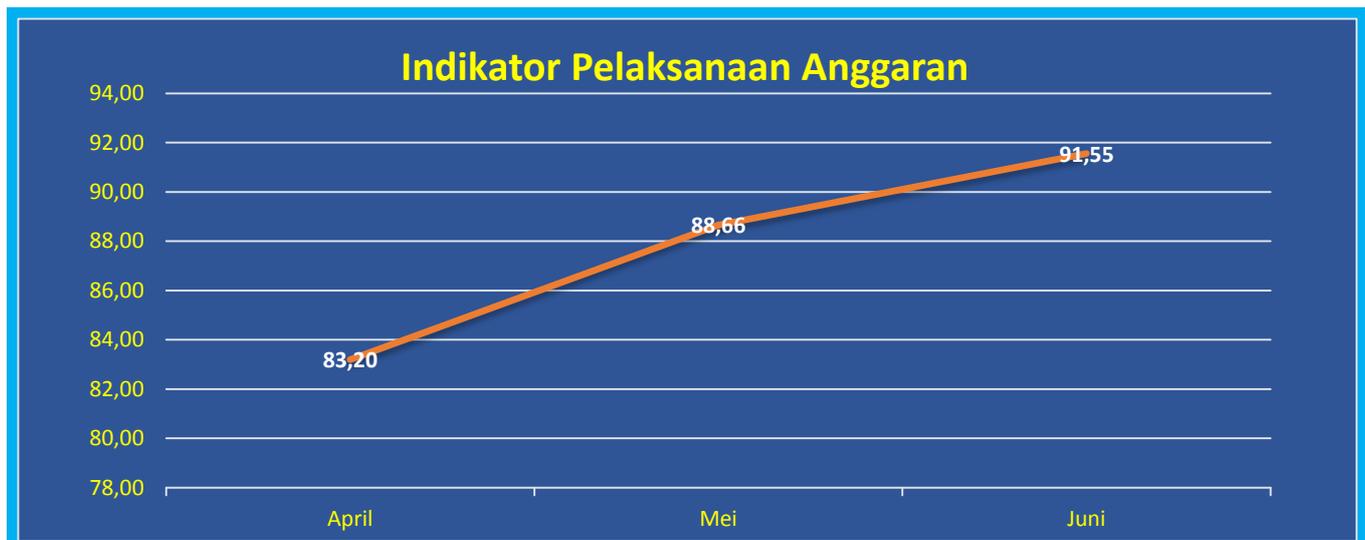
**Tabel 25 Rincian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA. 2019**

No	Indikator	April		Mei		Juni	
		Nilai Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengelolaan Uang Persediaan (UP)	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00
2	Data Kontrak	82.00	12.30	85.00	12.75	79.00	11.85
3	Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)	85.00	5.10	90.00	5.40	90.00	5.40
4	Retur SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana)	99.88	5.99	99.91	5.99	99.87	5.99
5	Halaman III DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	12.58	0.63	8.66	0.43	23.66	1.15
6	Revisi DIPA	100.00	5.00	100.00	6.00	100.00	5.00
7	Penyelesaian Tagihan	92.86	13.93	92.86	13.93	94.44	14.17
8	Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00
9	Renkas (rencana Kas/Penarikan Dana)	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00
10	Realisasi	61.30	12.26	91.83	18.37	100.00	20.00

No	Indikator	April		Mei		Juni	
		Nilai Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai Bobot (%)	Nilai Akhir
11	Pagu Minus	99.86	3.99	100.00	4.00	99.75	3.99
12	Dispensasi SPM	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00
Nilai Total			83,20		88,66		91,55

Dari tabel di atas terlihat bahwa masing-masing indikator dalam IKPA adalah tetap atau meningkat, kecuali untuk indikator: Halaman III DIPA dan Data kontrak, dimana pada bulan Mei menurun dari bulan April. Secara total, nilai IKPA meningkat cukup baik dari bulan April sampai ke Juni. Apabila dibandingkan dengan target (90), maka capaian pada bulan Juni telah melewati target. Jika dibandingkan pada triwulan I juga masih terlihat peningkatan yang menggembirakan. Pada triwulan I, berturut-turut sejak bulan Januari sampai dengan Maret nilai IKPA Kemenko Kemaritiman adalah 65,78; 80,81; dan 82,50.

**Gambar 5 Grafik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA. 2019**



Beberapa hal yang berperan dalam keberhasilan pencapaian target nilai IKPA yang baik adalah:

1. Adanya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban dalam pengelolaan anggaran;
2. Peningkatan kemampuan pelaksanaan anggaran dari masing-masing unit kerja di lingkup Kemenko Kemaritiman;
3. Adanya dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan ;
4. Penyusun jumlah pengajuan penggunaan anggaran yang dibutuhkan secara proporsional sesuai kemampuan penggunaannya dan akuntabel.

Selain itu beberapa program yang turut mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini:

1. Program meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat;
2. Program konsultasi dan bimbingan dari Kementerian Keuangan selaku lembaga yang berwenang melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu atau sebagai *tools* dalam penyelesaian pekerjaan.

### **IKP.18 Persentase Konsistensi Perencanaan terhadap Pelaksanaan Kinerja**

Indikator selanjutnya (IK.3) pada Sasaran Strategis ini adalah Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran. Indikator ini dapat didefinisikan sebagai konsistensi rancangan program dan anggaran yang terakhir (DIPA terakhir) terhadap awal rencana/rancangan program dan anggaran yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Indikator ini ditargetkan pada akhir semester I dan akhir TA. 2019.

Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja adalah persentase atau jumlah rencana pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) akhir dibandingkan rencana pada DIPA awal. Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur konsistensi unit kerja dalam perencanaan kinerja dan pelaksanaan kinerja. Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan tahun 2018. Formula mengukur persentase inkonsistensi adalah dengan menghitung persentase konsistensi dari jumlah anggaran yang tetap pada tiap-tiap keluaran kegiatan (*output*). Untuk menghitung konsistensi itu terlebih dahulu menghitung perbedaan ( $\Delta$ ) jumlah anggaran pada masing-masing keluaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta = \frac{\text{Jumlah Anggaran Akhir Tahun} - \text{Jumlah Anggaran Awal Tahun}}{\text{Jumlah Anggaran Awal Tahun}} \times 100\%$$

Setelah nilai perbedaan anggaran diketahui kemudian menghitung anggaran yang tetap (konsisten) dengan rumus:  $100\% - \Delta$

Dokumen perencanaan anggaran (DIPA) merupakan pedoman instansi pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan. Di dalam dokumen perencanaan telah ditetapkan target kinerja dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan harus berpedoman pada dokumen perencanaan. Namun seringkali karena berbagai kondisi dan kebutuhan, baik eksternal maupun internal, rencana yang sudah dibuat harus berubah. Mekanisme untuk dapat membiayai kegiatan baru atau yang tidak direncanakan adalah melalui revisi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan apabila terjadi kebutuhan pada kegiatan tertentu dan anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan

tersebut. Untuk membuat unit-unit kerja dapat lebih disiplin dan cermat dalam menyusun rencana kegiatan, maka disusunlah target dan indikator kinerja yang berkaitan dengan konsistensi penganggaran. Dalam perhitungan konsistensi anggaran, basis perhitungannya adalah berdasarkan keluaran kegiatan sebagai mana tabel berikut ini:

**Tabel 26 Kode dan Nama Keluaran (Output) Kemenko Kemaritiman Tahun 2019**

Kode	Uraian
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi Hukum dan Organisasi
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5748	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional
5605	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim
5749	Koordinasi Kemanan dan Ketahanan Maritim
5750	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim
5751	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim
5752	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
5606	Koordinasi Sumber Daya Hayati
5753	Koordinasi Sumber Daya Mineral Energi dan Nonkonvensional
5754	Koordinasi Jasa Kemaritiman
5755	Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim
5756	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa
5607	Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik
5757	Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi
5758	Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata
5759	Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur
5760	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
5608	Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim
5761	Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim
5762	Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari
5763	Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim
5764	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim

Berikut ini rincian perubahan penganggaran di Kemenko Kemartiman:

**Tabel 27 Perhitungan Konsistensi Anggaran Triwulan II TA. 2019**

Kode	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Perubahan (+/-)	Persentase	Rerata
<b>Biro Umum</b>					0%
5601	130.044.807.000	130.044.807.000	0	0%	
<b>Biro Perencanaan</b>					0%
5602	11.339.808.000	11.339.808.000	0	0%	

Kode	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Perubahan (+/-)	Persentase	Rerata
<b>Biro Informasi dan Hukum</b>					0%
5603	13.818.498.000	13.818.498.000	0	0%	
<b>Inspektorat</b>					0%
5604	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0%	
<b>Staf Ahli</b>					0%
5748	1.570.717.000	1.570.717.000	0	0%	
<b>Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim</b>					16,61%
5605	3.168.274.000	3.518.274.000	350.000.000	11%	
5749	3.550.908.000	4.175.908.000	625.000.000	17,60%	
5750	3.052.852.000	4.552.852.000	1.500.000.000	49,13%	
5751	3.127.663.000	4.541.555.000	1.413.892.000	45,21%	
5752	9.739.536.000	5.850.644.000	-3.888.892.000	-39,93%	
<b>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa</b>					0%
5606	4.145.841.000	4.145.841.000	0	0%	
5753	4.145.431.000	4.145.431.000	0	0,00%	
5754	4.086.234.000	4.086.234.000	0	0,00%	
5755	4.145.431.000	4.145.431.000	0	0,00%	
5756	3.904.636.000	3.904.636.000	0	0,00%	
<b>Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur</b>					0%
5607	4.263.772.000	4.263.772.000	0	0%	
5757	4.263.772.000	4.263.772.000	0	0,00%	
5758	4.263.772.000	4.263.772.000	0	0,00%	
5759	4.263.772.000	4.263.772.000	0	0,00%	
5760	6.196.151.000	6.196.151.000	0	0,00%	
<b>Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim</b>					0%
5608	7.550.000.000	7.550.000.000	0	0%	
5761	4.800.000.000	4.800.000.000	0	0,00%	
5762	4.400.000.000	4.400.000.000	0	0,00%	
5763	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,00%	
5764	6.824.977.000	6.824.977.000	0	0,00%	

Berdasarkan hasil penyampaian laporan sebagaimana tabel di atas, maka persentase perubahan perencanaan adalah:

$$= \frac{0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 32,58 + 0,0 + 0,0 + 0,0}{9} \times 100\%$$

$$= 3,62 \%$$

Sehingga Realisasi IK ini pada triwulan II tahun 2019 adalah 96,38% atau 103,54% dari target yang ditetapkan (90 %). Hal ini berarti hanya terdapat 3,62% anggaran yang tidak konsisten dari perencanaan awal. Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam penyampaian laporan ini adalah tingkat konsistensi

perencanaan per kegiatan terutama yang berkaitan dengan target kinerja. Diharapkan dengan semakin baik kualitas perencanaan maka konsistensi perencanaan akan semakin konsisten.

### **3.1.8. Sasaran Program (SP) 8**

#### **Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tersedianya dokumen dan/atau rancangan administrasi untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah tersedianya dokumen pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Bidang Kemaritiman. Penerapan organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko Kemaritiman adalah dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan. SP.8 ini hanya memiliki satu indikator kinerja, yaitu IKP.19: Jumlah Kebijakan/Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan.

Bobot SP.8 ini adalah 4,29%, pada triwulan II jumlah dokumen dan/atau rancangan yang ditargetkan adalah 2 buah, yaitu Dokumen Rencana Kerja Kemenko Kemaritiman TA 2020 dan Penetapan Program Prioritas dan Quick Win Kemenko Kemaritiman TA. 2019. Dua target dokumen tersebut berhasil dicapai/disusun, sehingga capaian SP.8 atau IKP.19 ini adalah 100% dari target.

Jika dibandingkan dengan target dalam setahun, maka capaian sampai dengan Semester I TA. 2019 ini adalah 33,33% dari target. Masih terdapat 4 target dokumen dan/atau rancangan administrasi yang perlu direalisasikan tahun ini, yaitu: Renstra Kemenko Kemaritiman 2020-2024; DIPA TA. 2020; Pedoman Perencanaan program dan Anggaran, serta Pedoman Pengelolaan Pengamanan dan Ketertiban lingkup Kemenko Kemaritiman.

### **3.1.9. Sasaran Program (SP) 9**

#### **Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kementerian Koordinator**

Penerapan organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko Kemaritiman adalah dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Setmenko Kemaritiman. Bobot SP.9 adalah 4,29% dari total sasaran program yang ada. SP.9 hanya memiliki satu

indikator (IKP.20): Nilai Evaluasi AKIP Setmenko Kemaritiman. Pada triwulan II TA. 2019, IKP.20 ini tidak ditargetkan pencapaiannya.

Nilai Evaluasi AKIP Setmenko Kemaritiman adalah nilai evaluasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Setmenko Kemaritiman. Formula penghitungan nilai adalah dengan menggunakan hasil evaluasi SAKIP. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

**Tabel 28 Hasil penilaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Setmenko Tahun 2018**

No	Komponen	Bobot	2017
1.	Perencanaan kinerja	45	33,25
2.	Pengukuran kinerja	35	21,75
3.	Pelaporan kinerja	20	18,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>73,00</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja untuk meningkatkan nilai AKIP Setmenko, maka telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah melakukan perencanaan dengan baik, rencana kinerja tahunan hampir keseluruhannya sudah dibuat selaras dengan dokumen Renstra.
2. Sudah melakukan pengukuran atas kinerja melalui aplikasi yang berbasis kinerja dengan model balance scorecard.
3. Mendorong penerapan manajemen kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja serta melengkapi dokumen pendukung perencanaan kinerja, sehingga dapat mewujudkan *performanced based organization* agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja sehingga tersedia data dan informasi kinerja yang dapat diandalkan dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu perlu dilakukan pelaksanaan monitoring capaian kinerja sampai dengan tingkat individu, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
5. Memanfaatkan informasi yang tersaji dalam laporan kinerja sebagai penilaian program, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan serta peningkatan kinerja.

### 3.1.10. Sasaran Program (SP) 10 Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator

Sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator adalah terselenggaranya sistem perencanaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sama dengan SP.9, SP.10 ini memiliki bobot penilaian 4,29% dari total penghitungan capaian kinerja Setmenko Kemaritiman. SP.10 memiliki 1 (satu) indikator yaitu IKP.14: **Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN.**

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi tentang temuan bidang keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (APIP) yang ditindaklanjuti (dilaksanakan) oleh Biro Umum (selaku penanggungjawab proses pengadministrasian keuangan). Indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil reviu atas Laporan Keuangan tahun 2018 menjadi relevan karena sejalan dengan sasaran “Terselenggaranya Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman”.

IKP.21 ini ditargetkan pada triwulan I dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target. Berdasarkan hasil reviu Laporan Keuangan tahun 2018, terdapat 76 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pengelola keuangan di lingkungan Kemenko Kemaritiman. Dari 76 buah rekomendasi hasil reviu atas tersebut telah ditindaklanjuti semuanya. Dengan demikian realisasi persentase tindak lanjut atas hasil reviu atas laporan kinerja mencapai sebesar 100%.

Capaian ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran, dan pemahaman serta kerja sama pengelola keuangan dengan penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu atas laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Strategi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bagian Keuangan Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada saat pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan berlangsung, sehingga Inspektorat mengetahui dan memahami permasalahan serta latar belakang dalam penyusunan laporan keuangan oleh pengelola keuangan sehingga dapat memberikan rekomendasi yang sesuai;
2. Melakukan koordinasi kepada personel terkait lainnya berupa konsultasi dan pendampingan dalam pelaksanaan tugasnya yang masih ditemukan kesalahan maupun kelemahan-kelemahan dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut.

### 3.2. Capaian Realisasi Keuangan

Nilai capaian kinerja realisasi keuangan pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

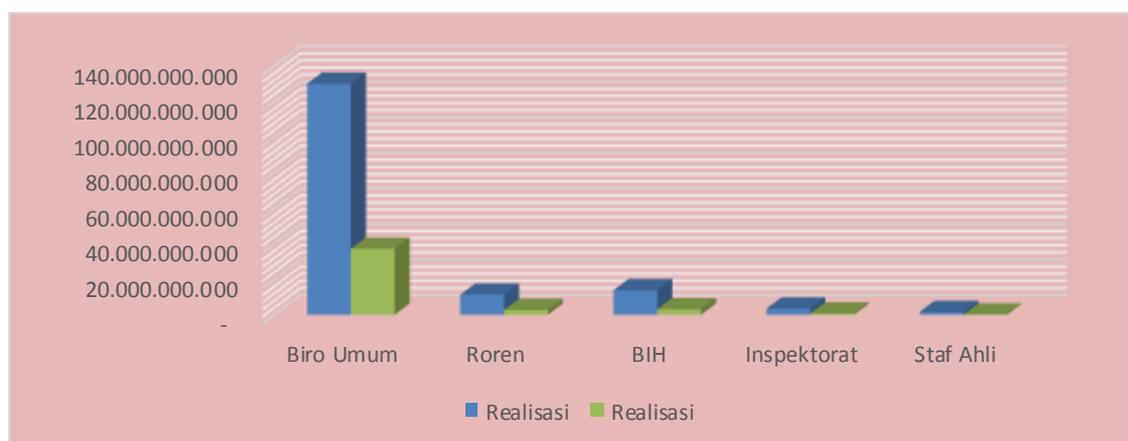
**Tabel 29 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan II TA. 2019**

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran Serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Biro Umum)	130.044.807.000	37.187.728.366	28.60
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja, dan Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)	11.339.808.000	2.701.986.855	23.83
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi dan Hukum Organisasi (BIH)	13.818.498.000	3.054.336.199	22.10
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Inspektorat)	3.500.000.000	723.919.091	20.68
5748	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman (Staf Ahli Menteri)	1.570.717.000	88.212.000	5.62
<b>Total</b>		<b>160.273.830.000</b>	<b>43.756.182.511</b>	<b>27,30</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa unit kerja eselon II pada Setmenko Kemaritiman dengan persentase realisasi tertinggi adalah pada Biro Umum (28,60%). Sementara unit kerja dengan persentase realisasi terkecil ada pada unit operasional Staf Ahli Menteri (5,62%). Staf Ahli Menteri walaupun merupakan eselon I, pada operasional kegiatan masuk dalam tanggung jawab anggaran di Biro Umum pada Bagian Protokol. Hal ini terjadi karena Staf Ahli Menteri masih fokus dalam kegiatan penyusunan PDB Maritim yang dibiayai Biro Informasi dan Hukum serta RPJMN Kemaritiman yang dibiayai Biro Perencanaan.

Secara total, persentase realisasi Setmenko Kamaritiman pada triwulan II TA. 2019 adalah 27,30%, Nilai ini sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan (30%).

**Gambar 6 Realisasi Keuangan per Program di Setmenko Triwulan II TA. 2019**



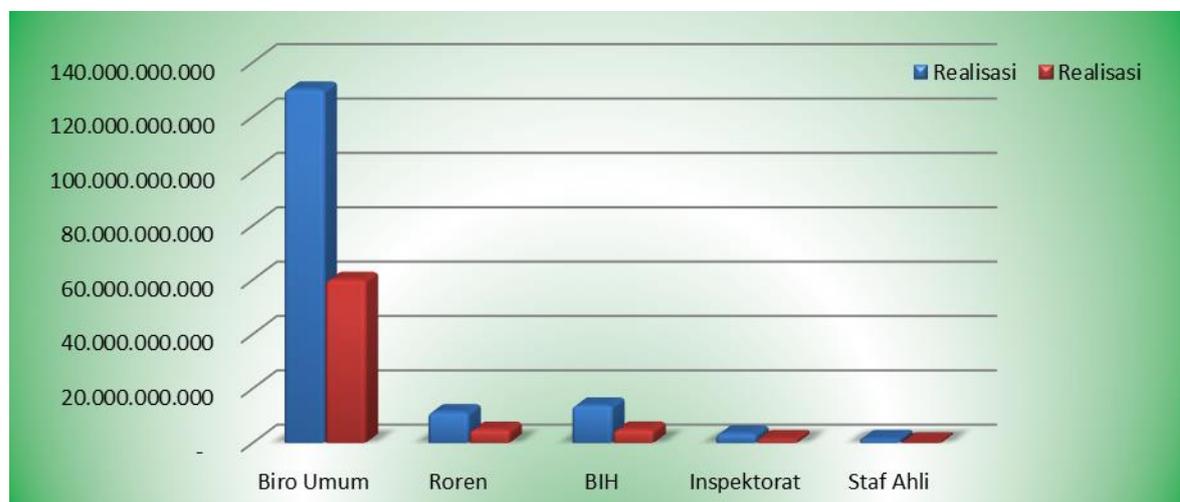
Sementara itu berdasarkan realisasi keuangan per semester (tabel 27), unit kerja eselon II pada Setmenko Kemaritiman dengan persentase realisasi tertinggi adalah pada Biro Umum (46,16%). Sementara unit kerja dengan persentase realisasi terkecil ada pada unit operasional Staf Ahli Menteri (5,73%). Staf Ahli Menteri walaupun merupakan eselon I, pada operasional kegiatan masuk dalam tanggung jawab anggaran di Biro Umum pada Bagian Protokol. Pada Semester I TA. 2019 ini mempunyai realisasi yang termasuk paling rendah di lingkup Kemenko Kemaritiman. Hal ini terjadi karena Staf Ahli Menteri masih fokus dalam kegiatan penyusunan PDB Maritim yang dibiayai Biro Informasi dan Hukum serta RPJMN Kemaritiman yang dibiayai Biro Perencanaan.

**Tabel 30 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Semester I TA. 2019 per Unit Kerja**

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran Serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Roum)	130.044.807.000	60.026.070.041	46.16
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja, dan Reformasi Birokrasi (Roren)	11.339.808.000	4.915.217.937	43.34
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi dan Hukum Organisasi (BIH)	13.818.498.000	4.994.408.889	35.78
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Inspektorat)	3.500.000.000	1.518.183.499	43.38
5748	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman (Staf Ahli Menteri)	1.570.717.000	90.012.000	5.73
<b>Total</b>		<b>160.273.830.000</b>	<b>71.493.892.366</b>	<b>44,61</b>

Secara total, persentase realisasi Setmenko Kamaritiman pada Semester I TA. 2019 adalah 44,61%. Nilai ini sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan (45%).

**Gambar 7 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Semester I TA. 2019**



Adapun rincian realisasi keuangan Setmenko Kemaritiman Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 31 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan II TA. 2019 per Keluaran**

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601.951	Layanan Internal (Overhead)	15.147.358.000	2.704.169.985	13.87
5601.954	Layanan Manajemen SDM	4.865.655.000	988.387.400	20.31
5601.955	Layanan Manajemen Keuangan	4.249.995.000	877.471.431	20.65
5601.956	Layanan Manajemen BMN	396.870.000	80.486.000	20.28
5601.959	Layanan Protokoler	22.691.538.000	6.649.383.587	29.30
5601.962	Layanan Umum	1.776.350.000	895.883.040	50.43
5601.994	Layanan Perkantoran	80.917.041.000	24.991.946.923	30.89
5602.001	Layanan Pengelolaan Kerjasama	3.298.485.000	1.122.579.252	34.03
5602.952	Layanan Perencanaan	3.038.481.000	391.164.509	12.87
5602.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.938.898.000	472.623.100	24.38
5602.961	Layanan Reformasi Birokrasi	3.063.944.000	715.619.992	23.36
5603.001	Layanan Persidangan	1.100.000.000	382.729.000	34.79
5603.957	Layanan Hukum	1.939.183.000	525.697.899	27.11
5603.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	3.076.000.000	1.255.651.701	40.82
5603.963	Layanan Data dan Informasi	7.703.315.000	890.257.599	11.56
5604.001	Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3.500.000.000	248.939.621	20.68
5748.001	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman	1.570.717.000	88.212.000	5.62
<b>Jumlah</b>		<b>160.273.830.000</b>	<b>43.756.182.509</b>	<b>27.30</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase realisasi tertinggi adalah keluaran: Layanan Umum (50,43%). Hal ini terjadi karena pada Triwulan II telah banyak dilakukan kegiatan dan belanja barang rumah tangga yang memakai anggaran Biro umum. Sementara Layanan Perkantoran memiliki nilai realisasi tertinggi. Pada layanan ini banyak digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan rekomendasi penguatan dan penataan regulasi dan kelembagaan Kemaritiman memiliki persentase realisasi terendah (5,62%).

Sementara itu, rincian realisasi penggunaan anggaran di Setmenko Kemaritiman pada semester I TA. 2019 seperti yang tertera pada tabel 31, semakin meningkat per bulannya

**Tabel 32 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Semester I TA. 2019 per Keluaran**

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601.951	Layanan Internal (Overhead)	15.147.358.000	3.047.341.785	15.64
5601.954	Layanan Manajemen SDM	4.865.655.000	2.404.576.408	49.42
5601.955	Layanan Manajemen Keuangan	4.249.995.000	1.964.187.441	46.22

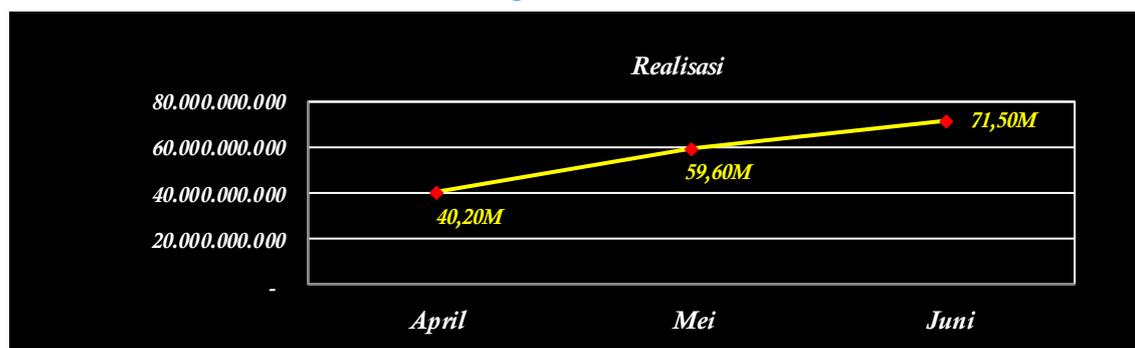
Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601.956	Layanan Manajemen BMN	396.870.000	203.986.000	51.40
5601.959	Layanan Protokoler	22.691.538.000	10.516.150.932	46.34
5601.962	Layanan Umum	1.776.350.000	1.213.385.900	68.31
5601.994	Layanan Perkantoran	80.917.041.000	40.676.441.575	50.27
5602.001	Layanan Pengelolaan Kerjasama	3.298.485.000	1,740.920,546	52.78
5602.952	Layanan Perencanaan	3.038.481.000	1.231,133.959	40.52
5602.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.938.898.000	914.428.900	47.16
5602.961	Layanan Reformasi Birokrasi	3.063.944.000	1.089.039.596	35.54
5603.001	Layanan Persidangan	1.100.000.000	604.495.372	54.95
5603.957	Layanan Hukum	1.939.183.000	739.674.699	38.14
5603.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	3.076.000.000	1.745.565.947	56.75
5603.963	Layanan Data dan Informasi	7.703.315.000	1.854.909.871	24.08
5604.001	Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3.500.000.000	1.518.183.499	43.38
5748.001	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman	1.570.717.000	90.012.000	5.73
<b>Jumlah</b>		<b>160.273.830.000</b>	<b>71.493.892.364</b>	<b>44.61</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase realisasi tertinggi adalah keluaran: Layanan Umum (68,31%). Hal ini terjadi karena pada Semester I telah banyak dilakukan kegiatan dan belanja barang pada Biro Umum. Sedangkan rekomendasi penguatan dan penataan regulasi dan kelembagaan Kemaritiman memiliki persentase realisasi terendah (5,73). Sementara realisasi penggunaan anggaran di Setmenko Kemaritiman per bulan pada Semester I TA. 2019 seperti yang tertera pada tabel 31, semakin meningkat per bulannya.

**Tabel 33 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan II per bulan**

Bulan	Bulanan	Persentase	Akumulasi	Persentase
April	12,456,260,312	7,77%	40,193,970,203	25,12%
Mei	19,378,616,125	12,09%	59,572,586,328	37,23%
Juni	11,921,306,074	7,44%	71,493,892,364	44,61%

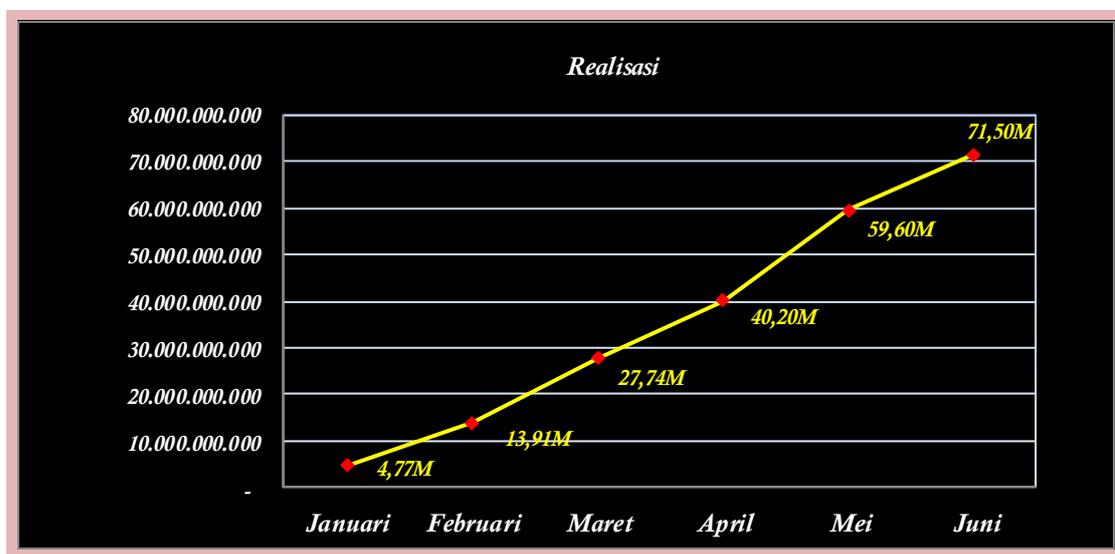
**Gambar 8 Grafik Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan II 2019**



**Tabel 34 Realisasi Keuangan per bulana Setmenko Kemaritiman Semester I 2019**

Bulan	Bulanan	Persentase	Akumulasi	Persentase
Januari	4,763,981,127	2,97%	4,763,981,127	2,97%
Februari	9,145,640,673	5,70%	13,909,621,800	8,69%
Maret	13,828,088,091	8,71%	27,737,709,891	17,33%
April	12,456,260,312	7,77%	40,193,970,203	25,12%
Mei	19,378,616,125	12,09%	59,572,586,328	37,23%
Juni	11,847,503,074	7,44%	71,493,892,364	44,61%

**Gambar 9 Grafik Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Semester I 2019**



### 3.3. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

Secara umum, pada triwulan I TA. 2019 di lingkup Setmenko Kemaritiman masih kekurangan pegawai, terutama staf bagian administrasi dan keuangan, staf bagian hukum. Setmenko Kemaritiman sampai saat ini belum menyusun kebutuhan jumlah pegawai dan peta jabatannya. Komposisi jumlah sumber daya manusia pada Setmenko Kemaritiman sampai dengan akhir triwulan II TA. 2019 berjumlah 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) orang yang terdiri dari unsur pegawai PNS 147 (seratus empat puluh tujuh) orang, serta pegawai non-PNS (JPT Madya, Tenaga Ahli, dan Penasehat Khusus dan tenaga kerja kontrak) sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang, serta tenaga pendukung (satpam, pengemudi, pramubakti, dan petugas kebersihan) 146 (seratus empat puluh enam) orang.

Adapun keragaman pegawai Setmenko Kemaritiman berdasarkan jenjang jabatan pada tabel berikut ini:

**Tabel 35 Jumlah Kondisi Pegawai Setmenko Kemaritiman**

Jabatan		Biro Umum	Biro Perencanaan	Biro Informasi dan Hukum	Inspektorat	Jumlah	Kebutuhan
JPT Madya		3	-	-	-	3	5
JPT Pratama		1	1	1	1	4	4
Jabatan Administrator		4	4	4	-	12	12
Jabatan Pengawas		12	8	9	1	30	31
Jabatan Pelaksana Administratif	PNS	54	15	15	12	96	161
	Tenaga Kontrak	30	14	16	4	64	
Jabatan Fungsional	Ahli				1	1	
	Terampil					0	
Penasehat Khusus		6				6	
Tenaga Ahli		17				17	
Tenaga Pendukung							
Satpam		-	-	-	-	48	
Pengemudi		-	-	-	-	42	
Pramubakti		-	-	-	-	31	
Petugas Kebersihan		-	-	-	-	25	
<b>Jumlah</b>		<b>135</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>387</b>	

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa masih ada beberapa yang perlu di isi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (Eselon 1.b) masih kekurangan 2 (dua) orang, yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut dan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas, Asisten Deputi Hukum Dan Perjanjian Maritim, Jabatan Administrator (Eselon III.a) masih ada yang lowong antara lain Kepala Bidang Industri Dasar, Kepala Bidang Pengelolaan SDM, Kepala Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan dan Jabatan Pengawas (Eselon IV.a) Kepala Subbagian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

## IV. PENUTUP

Pencapaian kinerja Setmenko Kemaritiman Triwulan II TA. 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Setmenko Kemaritiman adalah 102,41%, meningkat 9,44% dibanding triwulan sebelumnya (92,97%). Hal ini terjadi karena perbaikan capaian kinerja pada beberapa IKP, seperti IKP.11 dan IKP.15.
2. Keberhasilan capaian kinerja didasarkan pada:
  - a. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing pelaksana;
  - b. Dukungan dan komitmen dari pimpinan;
  - c. Dukungan sarana dan prasarana dan anggaran.
  - d. Target yang ditetapkan realistis untuk dapat dicapai
3. Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik keuangan maupun kinerja di Setmenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:
  - a. Masih kurangnya jumlah tenaga pegawai (terutama pelaksana teknis sesuai unitnya) Setmenko Kemaritiman serta unit eselon I lainnya di lingkup Kemenko Kemaritiman. Dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator kinerja Setmenko memerlukan kerja sama dari seluruh unit kerja di kementerian.
  - b. Terdapatnya beberapa penugasan dan atau kegiatan yang saling bersilangan fungsi dan target, atau penugasan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan tidak dianggarkan.
4. Untuk peningkatan capaian kinerja direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penugasan unit kerja yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan baik di tingkat Biro maupun Setmenko, dengan memaksimalkan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Sesmenko
  - b. Agar segera disusun peta jabatan, standar kompetensi jabatan serta analisa beban kerja pegawai
  - c. Pengisian SDM dengan status PNS dan penempatan sesuai nomenklatur jabatan (SK pengangkatan jabatan), sehingga selain menunjang kinerja organisasi secara optimal juga dapat memberikan kemudahan peningkatan karir pegawai dengan baik, jelas dan adil
  - d. Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan terhadap tugas dan fungsi antara lain dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - e. Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang pelaksanaan fungsi pelayanan yang cepat, tepat dan meminimalkan terjadinya kesalahan (*error*);
  - f. Melaksanakan disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan serta pertanggungjawaban sesuai jadwal (tepat waktu).

## LAMPIRAN



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

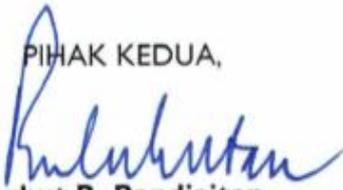
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

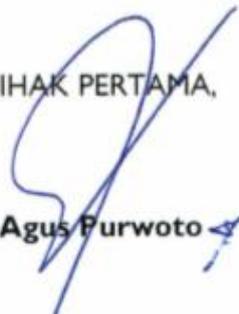
1. Nama : **Agus Purwoto**  
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Luhut B. Pandjaitan**  
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,  
  
Agus Purwoto

**LAMPIRAN I  
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
 SEKRETARIS MENTERI  
 KOORDINATOR BIDANG  
 KEMARITIMAN**

**TARGET KINERJA TAHUN 2019  
 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
<b>Customer Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Bidang Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman	70
		2	Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Bidang Kemaritiman	70
		3	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2
		4	Opini BPK	WTP
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	3
<b>Internal Business Process Perspective</b>				
SS.2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kemenko Bidang Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	70%
SS.3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70 %
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70 %
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	75 %
SS.4	Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif	10	Persentase Kepuasan Layanan Persidangan	80%
SS.5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	80%
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80%
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80%
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan BMN yang handal	14	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	80%

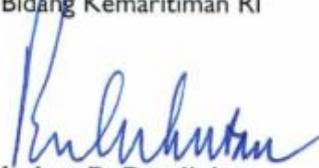
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
SS.7	Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Akurat	16	Persentase Penerapan SAKIP di Kemenko Bidang Kemaritiman	100%
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		18	Persentase Konsistensi Perencanaan	90%
SS.8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan	15
<b>Learning and Growth Perspective</b>				
SS.9	Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kemenko	20	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Kemenko	70
SS.10	Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Sekretariat Kemenko	21	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN	100%

**ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019  
 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp 130.044.807.000,-
2	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerjasama, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 11.339.808.000,-
3	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi Hukum dan Organisasi	Rp 13.818.498.000,-
4	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman	Rp 3.500.000.000,-
5	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	Rp 1.570.717.000,-
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp 160.273.830.000,-</b>

Jakarta, 13 Januari 2019

Menteri Koordinator  
 Bidang Kemaritiman RI

  
**Luhut B. Pandjaitan**

Sekretaris Kementerian  
 Koordinator Bidang Kemaritiman

  
**Agus Purwoto**